

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENURUNAN
KEMISKINAN DI ACEH DENGAN ANGGARAN
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI
TESIS**



Oleh:
Sarina Junita
240504210002

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2026**

**PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENURUNAN
KEMISKINAN DI ACEH DENGAN ANGGARAN
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI
TESIS**

Diajukan kepada :

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam Program Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

Sarina Junita
240504210002

Dosen Pembimbing

1. **Dr.Hj. Umrotul Khasanah, M.Si** NIP: 196702271998032001
2. **Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si** NIP: 197907282006042002

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul : Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh dengan Pendidikan Sebagai Variabel *Intervening*" yang ditulis oleh Sarina Junita (NIM 240504210002) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah diperiksa dan disetujui pada tanggal : 29-Mei

Batu, 29-Mei 2026

Oleh:

Pembimbing 1



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP.196702271998032001

Pembimbing 2



Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si.
NIP. 197907282006042002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprajitno, SE., M.Si., Ph. D
NIP. 197511091999031003

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dewan penguji tesis saudara Sarina Junita, NIM 240504210002, Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI ACEH DENGAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Juni 2026

Dewan Penguji:

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., A.CA.
NIP. 197203222008012005

(.....)
Penguji Utama

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M
NIP. 19750426201608012042

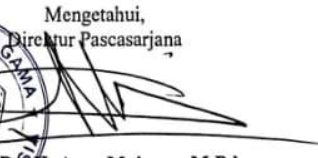
(.....)
Ketua Penguji

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag. M.Si
NIP. 196702271998032001

(.....)
Penguji/Pembimbing I

Dr. Umi Julaihah SE., M.Si
NIP. 197907282006042002

(.....)
Penguji/Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003



LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarina junita
NIM : 240504210002
Program Studi : Magister Ekonomi
Judul Penelitian : Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Dengan
Pendidikan Sebagai Variabel *Intervening*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya ilmiah atau penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian terbukti bahwa dalam hasil penelitian terdapat unsur-unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagai mestinya .

Batu, 28-Mei-2026

Hormat saya,


METERAI
TEMPER
32ANX417166701
Sarina Junita

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Terimakasih untuk segenap doa, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa batas demi mewujudkan impian dan kesuksesan penulis. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan betapa besar jasa dan perjuangan yang telah diberikan. Terimakasih telah berjuang tanpa henti untuk memenuhi setiap kebutuhan penulis, memastikan penulis tinggal di tempat yang layak, makan dengan baik dan sehat. Terimakasih karena selalu memastikan penulis melangkah dengan tenang. Kepada adik-adik penulis, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk pembuktian bahwa orang tua kita yang hanya lulusan SD telah berhasil dalam mendidik dan merawat anak-anaknya.

Semoga pencapaian sederhana ini mampu menjadi sedikit obat atas lelah yang selama ini ayah dan mama tanggung. Terimakasih telah menjadi harta berharga yang kumiliki. Terimakasih telah menjadi alasan terkuat untuk penulis terus maju dan tidak menyerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis , sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Aceh dengan Anggaran pendidikan Sebagai Variabel Mediasi” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu’Alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zamam.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syara untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Penelitian ini hadir sebagai upaya mengkaji secara ilmiah bagaimana alokasi dana otsus dan PAD dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetasan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan menjadikan anggaran pendidikan sebagai jalur transmisi yang mempertemukan kebijakan fiskal dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahi Malang yang telah menyediakan sarana dan prasarana akademik demi kelancaran studi penulis.
2. Direktur Program Pascasarjana beserta seluruh staf akademik yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan dalam proses administrasi akademik.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Bapak Eko Suprayitno, SE., MSi.,Ph.D yang telah memberikan motivasi dan bimbingan akademik selama penulis menempuh studi.

4. Ibu dosen pembimbing, bu Dr. Hj Umrotul Khasanah dan bu Dr. Umi Julaihah yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis selama proses penulisan dan penelitian tesis ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat bermamfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, tiada kata yang mampu mengungkapkan betapa besarnya rasa syukur dan terima kasih penulis atas segala pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang. Doa-doa yang senantiasa dipanjatkan serta dukungan yang tidak pernah surut di setiap langkah perjalanan penulis telah menjadi kekuatan terbesar yang menghantarkan penulis hingga pada titik ini.
7. Kepada adik-adik penulis, Atina Mafaza dan Zdarkir A.R, terima kasih sudah menjadi adik dan alasan penulis untuk terus kuat dan sabar dalam setiap proses perjuangan penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, doa dan naehat yang selalu diberikan kepada penulis agar selalu kuat dan selalu berfikir positif terhadap takdir yang sedang diperjuangkan.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat istimewa Niken dan Maulud yang oleh takdir dipertemukan dari daerah yang berbeda-beda, lalu disatukan dalam satu ruang bernama anggaran pendidikan. Kalian bukan sekadar teman seperjuangan, melainkan keluarga yang selalu hadir untuk menguatkan di kala lemah, membantu di kala kesulitan, dan menemani di setiap langkah perjalanan penulis hingga akhir.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dwi Putri Agustia, yang meski terpisah jarak dan pulau, tidak pernah absen memberikan

dukungan dan nasihat yang berarti bagi penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.

11. Dan juga kepada Anisatul Fitri, sahabat sekaligus keluarga yang sudah menemani dari proses Sarjana hingga Magisternya penulis. Penulis ucapkan terimakasih karena selalu mendengar keluh kesahnya penulis dna tanpa bosan selalu menemani penulis walaupun dengan cara yang cukup jauh.
12. Kepada seluruh rekan-rekan Magister Ekonomi Syariah, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Dukungan, nasihat, dan semangat yang kalian berikan telah menjadi penguat di setiap momen sulit, mendorong penulis untuk senantiasa bersabar dan tegar dalam menyelesaikan studi ini.
13. Terakhir, rasa terima kasih ini ingin penulis sampaikan kepada diri sendiri sosok sederhana dengan tinggi 145 cm dan ukuran kaki 38, Sarina Junita. Terima kasih telah berjuang melewati setiap fase perjalanan yang tidak selalu mudah ini. Lelah itu nyata, air mata itu pernah jatuh, dan keinginan untuk menyerah pun tidak sekali dua kali hadir menggoda. Namun kamu tetap memilih untuk bangkit, tetap memilih untuk melanjutkan langkah meski terasa berat. Terima kasih karena tidak pernah benar-benar menyerah, meski berkali-kali hampir melakukannya. Terima kasih karena selalu berusaha berpikir positif di tengah situasi yang tidak selalu berpihak. Perjalanan ini bukan hanya tentang gelar yang akan kamu sandang, tetapi tentang betapa kuatnya kamu telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu. Dan hari ini, kamu telah membuktikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang keuangan daerah dan kebijakan pengetasan kemiskinan. Semoha Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengabadikan diri untuk kemaslahatan umat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Batu, Juni, 2026

Sarina Junita

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi Adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Anggaran pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 054b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= zh
ث	= ts	ع	= ‘(koma atas)
ج	= j	غ	= g
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan kata koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â seperti قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î seperti قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û seperti دون menjadi dûna

Khusus yang ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-`ādah, bukan khawāriqu al-`âdati, bukan khawāriqul-`âdat; Inna al-din ‘inda Allāh al-Īslām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al Islāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Islamu dan seterusnya.

D. Ta' Marbutah ة

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada ditengah kalimat, tetapi jika ta' marbutah berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya للمدرسة الرسالة menjadi al-risalatul lil-mudarrisah. Atau apabila beradaditengan-tengan kalimat yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dlam lafadh al-jalalah yang berada ditengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Mâsyâ' Allah kâna wa ma lam yasya' lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan," Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata arab penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun xii berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahid", "Amin Rais", dan tidak ditulis dengan "salat".

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
MOTTO	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	20
C. Kajian Teori	21
1. Teori vicious circle of poverty	21
2. Konsep Kemiskinan	22
3. Dana Otonomi Khusus Aceh.....	29
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
5. Anggaran pendidikan Sebagai Variabel Mediasi	35
D. Kerangka Pemikiran.....	38
E. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Objek Penelitian.....	48

C.	Populasi dan Sampel	48
D.	Jenis dan Sumber Data	49
E.	Teknik Pengumpulan Data	49
F.	Definisi Operasional Variabel	50
G.	Teknik Analisis Data	51
H.	Pengujian Hipotesis	54
I.	Analisis Variabel Mediasi (Uji Sobel)	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		58
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B.	Analisis Statistik Deskriptif	63
C.	Pemilihan Model Regresi Data Panel	65
D.	Uji Asumsi Klasik	69
E.	Uji Hipotesis	74
F.	Analisis Variabel Mediasi (Uji Sobel)	77
BAB V PEMBAHASAN		80
A.	Pengaruh Dana Otsus terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ..	80
B.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskian di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	85
C.	Pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	87
D.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	91
E.	Pengaruh Anggaran pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	96
F.	Peran anggaran pendidikan sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan Dana Otsus terhadap Kemiskinan	98
G.	Peran Anggaran pendidikan sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan PAD terhadap Kemiskinan	100
BAB VI PENUTUP		105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi 2025	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Defenisi Operasioal Penelitian	52
Tabel 4.1 Perkembangan Persentase Kemiskinan di Aceh (2008-2024)	61
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif	65
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow (Sub 1)	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman (Sub1)	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier (Sub 1)	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow (Sub 2)	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman (Sub 2)	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Lagrange Multiplier (Sub 2)	70
Tabel 4.9 hasil uji Normalitas (sub 1)	70
Tabel 4.10 hasil uji Multikolinearitas (sub 1)	71
Tabel 4.11 Hasil Heteroskedastisitas (sub 1)	72
Tabel 4.12 hasil uji Autokolerasi (sub 1)	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas (Sub 2)	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas (Sub 2)	73
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sub 2)	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Autokolerasi (Sub 2)	74
Tabel 4.17 Hasil Uji T (Sub1)	75
Tabel 4.18 Hasil Uji F (Sub1)	76
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Sub 1)	77
Tabel 4.20 Hasil Uji T (Sub 2)	77
Tabel 4.21 Hasil Uji F (Sub 2)	78
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Sub 2)	78
Tabel 4.23 Hasil Uji Sobel	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013-September 2024.....	3
Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2024	4
Gambar 1.3 Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Per-Provinsi di Sumatera (2020-2025)	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40

MOTTO

(قَالَ كَلَّا إِنَّ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٦٢) (الشعراء/26:62)

“Dia (Musa) berkata, “Tidak! Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan menunjukiku.”

(Asy-Syu'ara'/26:62)

Manusia boleh berencana, ikhtiar boleh terus berjalan, namun petunjuk dan kemudahan hanyalah milik Allah semata. Maka jadikan keyakinan bahwa Dia selalu bersama sebagai bekal paling utama dalam setiap langkah.

ABSTRAK

Sarina Junita. 2026. Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Aceh Dengan Anggaran pendidikan Sebagai Variabel Mediasi. Tesis, Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Tesis: (1) Dr. Hj Umrotul Khasanah, M.Si., (2) Dr. Umi Julaihah, M.Si.

Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Kemiskinan, Anggaran pendidikan, Variabel Mediasi, Provinsi Aceh.

Kemiskinan di Provinsi Aceh hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum tuntas, di mana Aceh secara konsisten menempati posisi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera meskipun telah menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam jumlah yang sangat besar sejak tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anggaran pendidikan sebagai variabel *mediasi*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *eksplanatori*. Data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019–2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan model regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 14, serta uji Sobel untuk menguji peran mediasi variabel anggaran pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan dana otsus justru beriringan dengan tingginya angka kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaannya belum tepat sasaran. Sementara itu, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Anggaran pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada pengujian mediasi, anggaran pendidikan tidak mampu memediasi pengaruh Dana Otsus terhadap kemiskinan, namun anggaran pendidikan terbukti mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemiskinan secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal daerah melalui PAD yang dialokasikan secara strategis ke sektor anggaran pendidikan merupakan jalur yang paling efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Reformasi tata kelola Dana Otsus yang berorientasi pada dampak nyata dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak agar Dana Otsus dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan.

ABSTRACT

Sarina Junita, 2026, The Effect of Special Autonomy Funds and Regional Original Income (PAD) on Poverty Reduction in Aceh with Education as an Mediasi Variable. Thesis, Master of Islamic Economics Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Dr. Hj Umrotul Khasanah, M.Si., (2) Dr. Umi Julaihah, M.Si.

Keywords: Special Autonomy Fund, Regional Original Income, Poverty, Education, Mediasi Variable, Aceh Province.

Poverty in Aceh Province remains an unresolved issue, with Aceh consistently ranking among the highest poverty rates on the island of Sumatra despite receiving substantial Special Autonomy Funds (Otsus) since 2008. This study aims to analyze the influence of Special Autonomy Funds and Regional Original Revenue (PAD) on poverty levels in districts/cities in Aceh Province, both directly and indirectly through education as an mediasi variable.

This study uses a quantitative approach with an explanatory approach. The data used are panel data covering 23 districts/cities in Aceh Province for the period 2019–2025, sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and the Directorate General of Fiscal Balance. The analytical technique used is path analysis with a panel data regression model using EViews 14 software, and the Sobel test to examine the mediating role of education.

The results of the study indicate that the Special Autonomy Fund has a positive and significant effect on poverty, meaning that the increase in the Special Autonomy Fund is accompanied by a high poverty rate, indicating that its management is not well-targeted. Meanwhile, the Regional Original Revenue (PAD) has a negative and significant effect on poverty, meaning that the higher the PAD in a region, the lower the poverty rate. Education has been shown to have a negative and significant effect on poverty. In the mediation test, education was unable to mediate the effect of the Special Autonomy Fund on poverty, but education was shown to significantly mediate the effect of PAD on poverty. This study concludes that regional fiscal independence through PAD strategically allocated to the education sector is the most effective path in poverty alleviation efforts in Aceh Province. Reform of the Special Autonomy Fund governance that is oriented towards real impact and accountability is an absolute prerequisite for the Special Autonomy Fund to truly function as an instrument to break the chain of poverty.

خلاصة

سارينا يونيتا، 2026، أثر صناديق الحكم الذاتي الخاصة والدخل الأصلي الإقليمي على الحد من الفقر في آتشيه مع اعتبار التعليم متغيراً وسيطاً. رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف الأول: د. الحاج عمروت الخسانة، ماجستير في العلوم. المشرف الثاني: د. أمي جليحة، ماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية: صندوق الحكم الذاتي الخاص، الدخل الأصلي الإقليمي، الفقر، التعليم، المتغير الوسيط، مقاطعة آتشيه.

لا يزال الفقر في إقليم آتشيه مشكلةً عويصة، إذ يُصنّف الإقليم باستمرار ضمن أعلى معدلات الفقر في جزيرة سومطرة، على الرغم من حصوله على مخصصات مالية كبيرة من صندوق الحكم الذاتي الخاص (أوتسو) منذ عام ٢٠٠٨. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير صندوق الحكم الذاتي الخاص والإيرادات الإقليمية الأصلية على مستويات الفقر في مدن ومقاطعات إقليم آتشيه، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال التعليم كمتغير وسيط.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً كمياً تفسيرياً. وتعتمد البيانات المستخدمة على بيانات لوحية تغطي ٢٣ مدينة ومقاطعة في إقليم آتشيه للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٥، مستقاة من الجهاز المركزي للإحصاء، ووكالة التخطيط والتنمية الإقليمية، والمديرية العامة للميزانية المالية. وتعتمد الدراسة على تحليل المسار باستخدام نموذج انحدار البيانات اللوحية عبر برنامج EViews 14، واختبار سوبل لدراسة الدور الوسيط للتعليم. تشير نتائج الدراسة إلى أن صندوق الحكم الذاتي الخاص له أثر إيجابي وملاموس على الفقر، بمعنى أن زيادة هذا الصندوق تترافق مع ارتفاع معدل الفقر، مما يدل على أن إدارته غير موجهة بشكل فعال. في المقابل، فإن الإيرادات الأصلية الإقليمية لها أثر سلبي وملاموس على الفقر، بمعنى أنه كلما زادت هذه الإيرادات في منطقة ما، انخفض معدل الفقر. وقد تبين أن التعليم له أثر سلبي وملاموس على الفقر. في اختبار الوساطة، لم يتمكن التعليم من التوسط في أثر صندوق الحكم الذاتي الخاص على الفقر، ولكنه أظهر قدرة كبيرة على التوسط في أثر الإيرادات الأصلية الإقليمية على الفقر. وتخلص هذه الدراسة إلى أن الاستقلال المالي الإقليمي من خلال الإيرادات الأصلية الإقليمية المخصصة استراتيجياً لقطاع التعليم هو المسار الأكثر فعالية في جهود الحد من الفقر في مقاطعة آتشيه. ويُعد إصلاح حوكمة صندوق الحكم الذاتي الخاص، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومساءلة فعّالة، شرطاً أساسياً لكي يؤدي الصندوق دوره كأداة فعالة لكسر حلقة الفقر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial ekonomi yang hingga kini belum tuntas diselesaikan oleh negara maupun dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok mereka seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan juga kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan (Khairiroh 2025). Lebih dari sekedar kekurangan materi, kemiskinan juga mencerminkan lemahnya produktivitas, terbatasnya akses terhadap modal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kesejahteraan (Maharani et al. 2024).

Mengacu pada siaran pers BPS terbaru, terdapat tiga standar pengukuran kemiskinan yang digunakan secara internasional berdasarkan klasifikasi pendapatan Negara, yakni: *internasional poverty line* sebesar 2.15 US dollar per kapita per harinya untuk kemiskinan ekstrim, senilai 3.65 US dollar per kapita per harinya untuk Negara berpendapatan menengah bawah (*lower- middle income*), dan 6.84 US dollar per kapita per harinya untuk Negara berpendapatan menengah atas (*upper- middle income*) (Statistika 2025).

Pada tingkatan nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp535.547 per kapita perbulannya (Alaydrus

2023), kemudian diperbarui kembali pada September 2025 menjadi Rp641.443 per kapita per bulannya atau setara dengan Rp3.053.263 per rumah tangga per bulannya. Penduduk atau rumah tangga dengan pengeluaran dibawah angka tersebut dikategorikan sebagai golongan miskin (Khasim 2026). Dengan penetapan standar pengukuran yang sudah ditetapkan, jutaan penduduk Indonesia masih termasuk dalam kategori miskin, sehingga agenda upaya pengetasan kemiskinan ini tidak pernah benar-benar selesai.

Di Indonesia salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tingginya angka kemiskinan adalah ketidakseimbangan struktur perekonomian, di mana pertumbuhan sektor industri dan jasa belum mampu mengakomodasi tenaga kerja secara maksimal (Septiadi and Nursan 2023). Akibatnya, sebagian masyarakat terutama yang berada diwilayah pendesaan dan pesisir masih ketergantungan pada sektor pertanian yang tingkat produtifitasnya masih tergolong rendah. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, pendidikan, dan layanan kesehatan turut memperkuat lingkaran kemiskinan, khususnya di negara berkembang (Fernando and Samsuddin 2025).

Tingginya tingkat pengangguran akibat ketidakseimbangan antara jumlah kerja dan kesempatan kerja juga memperburuk kondisi tersebut, karena pengangguran yang berkepanjangan dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi (Ambarwati et al. 2024; Ahmad Choiri et al 2025). Pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran yang berkepanjangan dapat menimbulkan lemahnya kinerja ekonomi dan dapat

meningkatkan tingkat kemiskinan sehingga menghambat kesejahteraan masyarakat.

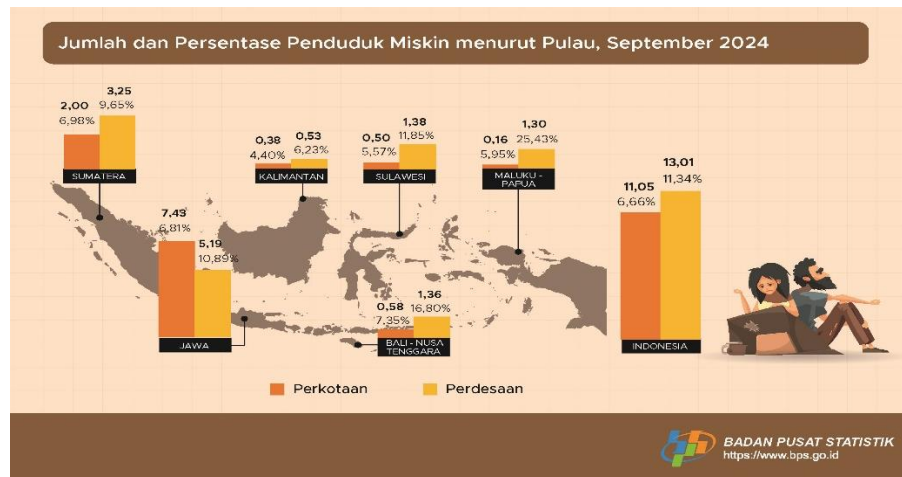
Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013-September 2024



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Secara tingkat nasional tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, dari 9.03% pada Maret 2024 menjadi 8.47 di September 2024, penurunan ini sejalan dengan berkurangnya penduduk miskin dari 25.22 menjadi 24.06 pada September 2024. Penurunan yang lebih signifikan juga terjadi di pedesaan sebesar 0.43% jika dibandingkan di perkotaan yang hanya turun sebesar 0.20%. Tercatat pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11.79%, sedangkan di perkotaan hanya 7.09% (Putra 2024)

Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, September 2024



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Meskipun secara nasional trend kemiskinan menunjukkan penurunan, dinamika antarwilayah memperlihatkan ketimpangan yang masih cukup tajam, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, serta akses terhadap pusat-pusat ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong disparitas tersebut (Lestari and Robiani 2023). Ketimpangan seperti ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum dapat dirasakan mamfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah.

Ketimpangan tersebut turut tercermin di pulau sumatera, salah satu pulau Indonesia dengan besar sekitar 473.481km yang terletak dibagian barat Nusantara, berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian sisi barat dan Selat Malaka di sisi kirinya (WikipediA 2026b). Posisi geografis yang strategis ini, ditambah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di sektor pertambangan minyak gas dan gas bumi (Sumselprov 2025), dan perdagangan

serta sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet (Jambi 2022), menjadikan Sumatera sebagai salah satu penyangga utama perekonomian nasional (Amalia and Emalia 2022).

Namun, dibalik potensi besar ini, Sumatera masih menyimpan beberapa wilayah dengan kemiskinan terbilang cukup dalam, dengan persentase penduduk miskin tercatat di BPS Per September 2024 sebesar 9.65% di wilayah pendesaan dan di perkotaan sebesar 6.98%. Disparitas antar provinsi di dalamnya masih cukup lebar yang dimana sejumlah provinsi dibagian utara Sumatera mencatat angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi dibagian tengah dan selatannya (Lestari and Robiani 2023)

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi, 2025

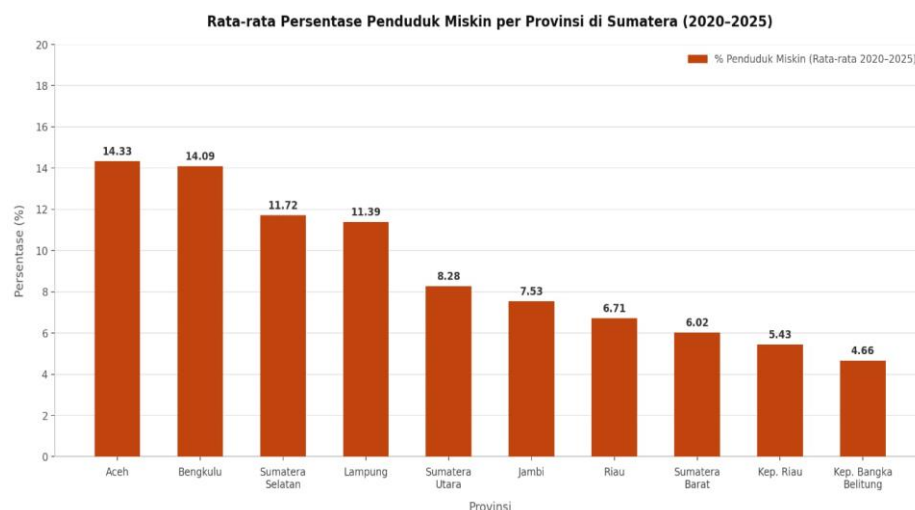
Provinsi	Garis kemiskinan -Maret	Garis kemiskinan -September	Jumlah penduduk miskin-Maret	Jumlah penduduk miskin-september	persetase kemiskinan -maret	persentase kemiskinan -september
Aceh	676.247	715.103	704.69	703.33	12.33	12.22
Sumatera Utara	666.546	718.220	1.140,25	1.128,06	7,36	7,24
Sumatera Barat	729.806	776.517	312,35	312,3	5,35	5,31
Riau	713.117	747.354	460,96	475,57	6,16	6,3
Jambi	664.127	713.849	270,94	261,25	7,19	6,89
Sumatera Selatan	581.702	609.044	919,6	898,24	10,15	9,85
Bengkulu	683.820	712.003	252,97	250,19	12,08	11,88
Lampung	612.451	634.062	887,02	860,13	10	9,66
Kepulauan Bangka Belitung	956.833	992.426	77,71	74,65	5	4,77
Kepulauan Riau	832.410	870.738	117,28	74,65	4,44	4,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS di antara 10 provinsi yang membentang luas di pulau Sumatera, Aceh secara konsisten menempati posisi sebagai tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Pada Maret 2025

jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 704,69 ribu jiwa atau sekitar 12,33 persen dari total populasi, jumlah angka ini menurun jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 12,64 persen (Statistik 2026). Meskipun dalam jangka panjang angka kemiskinan di Aceh menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, sehingga menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Sumatera (Safrinja et al. 2025).

Gambar 1.3 Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin per Provinsi di Sumatera (2020-2025)



Sumber: Data dioalah Peneliti

Perolehan data lainnya juga membuktikan angka kemiskinan Aceh pada tahun 2009-2023 mengalami penurunan dari 21,62% menjadi 14,45%, akan tetapi tidak mengubah bahwa provinsi ini tetap menduduki provinsi yang mencatat angka kemiskinan paling tinggi di Sumatera pada tahun 2020-2022. Angka kemiskinan yang tercatat pada tahun 2022 di Aceh senilai 14,75% termasuk angka yang tertinggal jauh dari pulau-pulau maju lainnya seperti

Bangka Belitung dengan data yang tercatat hanya 4,61% (Ricardo and Muchlisah 2023)

Kondisi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah Aceh yang berat yakni salah satu provinsi yang pernah dilanda 2 peristiwa besar yaitu, konflik bersenjata antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung selama hampir tiga dekade (1976-2004), kemudian dilanjutkan dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang dashyat pada Desember 2004 yang mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur, layanan publik, dan tatanan sosial masyarakat (Hertiana 2014). Peninggalan dua peristiwa besar ini menjadikan proses pemulihan ekonomi Aceh berjalan lebih jauh lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Menyadari kondisi Aceh yang membutuhkan percepatan pembangunan pascakonflik dan bencana, keputusan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan istimewa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) menjadi salah satu instrumen utama yang diamanatkan dalam regulasi tersebut, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan secara khusus guna membiayai pembangunan infrastruktur serta pembedayaan ekonomi masyarakat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan sektor kesehatan, pendidikan dan sosial (Zuhro 2018a). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Aceh menerima dana Otsus sebesar 2 persen dari pafilon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk periode 2008-2022, kemudian berkurang menjadi 1 persen untuk periode 2023-2027 (H. Cahyono 2018a).

Secara kumulatif, dana yang telah diterima oleh Provinsi Aceh sangat besar. Pada periode 2008-2016 Aceh telah menerima dana sekitar Rp48 triliun (Cahyono 2018), kemudian bertambah sekitar Rp55 periode 2017-2025 (Pemda 2024), sehingga secara keseluruhan Aceh diproyeksi akan menerima total dana otsus sekitar Rp163 triliun hingga berakhirnya kebijakan ini pada tahun 2027 (H. Cahyono 2018b).

Dari keseluruhan alokasi dana tersebut, sebesar 34% diarahkan untuk pembangunan ekonomi dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan di wilayah Aceh, sementara besaran dana yang dialokasikan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11% per tahun (Bappeda Aceh 2015). Angka-angka ini menegaskan bahwa secara fiskal, Aceh sesungguhnya memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan. Namun dibalik besarnya angka aliran dana otsus yang disalurkan, tingkat kemiskinan di Aceh hingga September 2024 masih tercatat sebesar 12.64% (Statistik 2026), sebuah angka yang memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pengelolaan dan dampak nyata dana otsus terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selain dana otsus, terdapat sumber fiskal lain yang ikut turut memegang peran penting dalam mendukung upaya pengetasan kemiskinan di Aceh, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator yang mencerminkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah, yang diukur melalui kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sendiri guna untuk membiayai penyelegaraan pemerintah, pembangunan infrastruktur,

peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat (Munawaroh et al. 2025).

Secara umum, PAD Aceh bersumber dari 4 komponen utama, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD), dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Yudhistira and Hanum 2026). Akan tetapi, tata kelola yang rendah dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset-asetnya menjadikan PAD Aceh belum bekerja secara optimal (Munawwarah 2020). Hal ini ditegaskan juga oleh Latif dan Marna dalam penelitian mereka , bahwa PAD Aceh tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa penyaluran PAD belum sepenuhnya diarahkan pada program masyarakat miskin (Abdul Latif 2026).

Besaran jumlah dana yang dialokasikan diharap mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penurunan kemiskinan yang signifikan. Namun sebaliknya, kemiskinan di Provinsi Aceh belum beranjak dari posisinya sebagai yang tertinggi di Pulau Sumatera. Penelitian Hasta Budiratna dan Qibthiyyah menemukan, bahwa dana otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh, berbeda dengan Papua Barat yang menunjukkan dampak positif (Qibthiyyah 2020). Serta penelitian Latif dan Marna yang menegaskan bahwa PAD juga tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya alokasi fiskal tidak serta merta berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang tepat sasaran serta berfokus pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia (Muhammad Razi 2025). Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: “Melalui jalur apa sebenarnya dana otsus dan PAD dapat berdampak nyata terhadap pengetasan kemiskinan di Provinsi Aceh?”

Jawaban atas pertanyaan tersebut mengarah pada satu variabel yang selama ini belum memperoleh perhatian yang semestinya dalam kebijakan fiskal Provinsi Aceh, yaitu pendidikan. Sebagai sektor yang secara eksplisit diamanatkan menerima minimal 30% persen alokasi dana otsus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 (Suryani 2018), sebuah kebijakan yang menepatkan pendidikan bukan sekedar sebagai tujuan pembangunan biasa, melainkan juga sebagai jembatan strategis yang menghubungkan besarnya alokasi dana dengan harapan penurunan kemiskinan secara nyata di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran pendidikan di Aceh melibatkan Majelis pendidikan Daerah (MPD) sebuah lembaga yang bertugas mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang (H. Aceh 2015).

Namun dibalik besarnya alokasi anggaran tersebut, akses dan kualitas pendidikan di Aceh masih belum merata, terutama dikawasan perdesaan dan daerah-daerah terpencil. Tercatat BPS 2023 angka kelulusan di jenjang SD sekitar 99.08%, dan di jenjang SMP 94.55, serta jenjang SMA sekitar 74.46% (Statistika 2024), sedangkan perolehan gelar sarjana hanya mencapai 5.06% atau sekitar 5.127 jiwa yang terkonsentrasi di sebagian kecil wilayah Aceh (Fadhlurrahman 2025). Kesenjangan pendidikan yang cukup dalam antar

wilayah ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh secara menyeluruh.

Pada tahun 2023 APBA yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sekitar Rp2.7 triliun, akan tetapi hal ini belum mampu mengangkat posisi Aceh dalam peta pendidikan Nasional. Dilihat dari hasil UTBK 2021 lulusan SMA/MA Aceh hanya menempati peringkat ke-24 untuk Saintek dengan skor 486.6 dan peringkat ke-26 di bidang Soshum dengan skor 472.86 (Ladayani 2023), dan angka ini jauh dari posisi yang seharusnya bisa dicapai oleh provinsi dengan keistimewaan fiskal sebesar Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang dialokasikan belum sepenuhnya berdampak lurus dengan pendidikan yang dihasilkan.

Temuan menarik lainnya yang dihasilkan oleh Soufyan dkk (2025) bahwa investasi pada aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan manusia terutama pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak merupakan instrument yang jauh lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata (Soufyan et.al 2025). Temuan empiris ini sejalan dengan landasan teori *Vicious Circle of Poverty* (Nukrse dalam Kuncoro. 1997) yang menegaskan bahwa rendahnya investasi pada anggaran pendidikan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga siklus kemiskinan terus berputar tanpa henti.

Dengan demikian, pendidikan tidak sekedar menjadi tujuan pembangunan, melainkan juga berfungsi sebagai jembatan strategis yang

menghubungkan kebijakan fiskal daerah dengan pengetasan kemiskinan, hal ini dibuktikan oleh Roza (2026) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pendidikan efektif dalam memutuskan siklus kemiskinan struktural melalui perubahan perilaku konsumtif menjadi produktif. (Roza et al. 2026).

Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan mengenai hubungan antara fiskal daerah dan kemiskinan di Aceh, seperti penelitian Rico dan Muchlisah (2023) yang mengkaji secara langsung dampak keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Aceh tanpa menggunakan mediasi/moderasi tambahan (Ricardo and Muchlisah 2023), dan studi Kadafi dan Murtala (2020) yang meneliti tentang pengaruh PAD dan alokasi dana Otsus terhadap kemiskinan di Aceh dalam periode 2010-2017 (Muhammad Kadafi 2020), serta penelitian Machfud (2020) yang menelusuri mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan dan dana Otsus terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota Aceh tanpa mengikutsertakan kemiskinan sebagai variabel yang dimediasi oleh pendidikan (Machfud, Asnawi 2020).

Ketiga penelitian diatas dilakukan langsung tanpa peran anggaran pendidikan sebagai jalur transmisi yang menghubungkan kebijakan fiskal daerah dengan penurunan kemiskinan, hal ini menjadi sebuah mekanisme yang secara teoritis dan empiris terbukti sangat krusial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Inkonsisten hasil yang didapatkan antar penelitian mengindikasikan bahwa model yang digunakan belum cukup komprehensif dalam menguraikan dan menjelaskan dinamika kemiskinan di Aceh secara utuh.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini hadir sebagai langkah untuk mengisi celah yang masih belum terjawab pada literature yang sudah ada, yakni dengan menganalisis pengaruh dana Otsus dan PAD terhadap penurunan kemiskinan di Aceh dengan menempatkan anggaran pendidikan sebagai variabel mediasinya, guna memahami mekanisme hubungan anatarvariabel secara lebih konprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap anggaran pendidikan di Provinsi Aceh?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran pendidikan di Provinsi Aceh?
5. Apakah anggaran pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
6. Apakah anggaran pendidikan memediasi pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
7. Apakah anggaran pendidikan memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap anggaran pendidikan di Provinsi Aceh
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendidikan di Provinsi Aceh.
5. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
6. Untuk mengetahui apakah anggaran pendidikan memediasi pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh
7. Untuk mengetahui apakah anggaran pendidikan memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap literature ekonomi dan pembangunan dan fiskal daerah. Juga dapat memeperkuat hubungan antara belanja publik, anggaran pendidikan dan kemiskinan.

2. Mamfaat Praktis

Menjadi evaluasi bagi pemerintahan Aceh dalam mengelola Dana Otsus dan PAD dan juga dapat memberi masukan kebijakan terhadap optimalisasi anggaran pendidikan guna mengurangi kemiskinan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bab ini menyajikan landasan teori dan kajian empiris yang digunakan sebagai kerangka untuk memahami, menganalisa, dan menjawab pertanyaan penelitian terkait topik yang dibahas. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan, sekaligus untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan hasil dari sejumlah penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul –Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di kota langsa (2019) Nurlina, syarifah syafira	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Langsa, sekaligus mengkaji dampak tidak langsungnya melalui alokasi belanja modal sebagai variable interveving terhadap indeks pembangunan manusia di kota tersebut	Data sekunder yang bersifat kuantitati, time series periode 2008-2015	Analisis jalur	Hasil penelitian menunjukan bahwa dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Langsa. Sebaliknya, alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM
	Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di	Bertujuan untuk menganalisa pengaruh PAD, DBH SDA, dan DOK	Kuantitatif	Regresi data panel	Dari peneliti yang telah dilaksanaka perolehan hasil membuktikan bahwa

	Aceh (2023) Rico Ricardo, Ayu Muchlisah, Feriansyah	terhadap kemiskinan di Aceh periode 2008-2020			hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat kemiskinan
3	Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Flypaper Effect di Provinsi Aceh (2018) T. Zulfan, Era Mustika	Mampu menstimulasi peningkatan pelayanan sektor publik	kuantitatif	Regresi data panel (2008–2017)	Dana Otsus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan memicu flypaper effect; PAD tidak signifikan
4	Evaluasi atas Transfera Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat (2020) Hasta Budirman, Riatu M. Qibthiyyah	Untuk mengukur seberapa besar pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan serta angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP di wilayah Aceh, Papua dan Papuan Barat	Kuantitatif	Regresi data panel (2013–2018)	Dana Otsus signifikan menurunkan kemiskinan di Papua Barat, tetapi tidak signifikan di Aceh
5	Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh : Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara (2019) Teuku Alfiady & Risna Dewi	Untuk menganalisa pengaruh dana otsus terhadap kemiskinan di aceh, mengetahui apakah kebijakan otsus efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kesejahteraan	Analisis statistic inferensial, studi empiris berbasis data skunder	Mengeksplorasi secara komprehensif berbagai sumber yang terpercaya dan relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang diteliti	Dana otsus belum sepenuhnya efektif menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM
6	Analisis Disparitas Wilayah di Provinsi Aceh: Telaah Pada Dana Otonomi Khusus (2018)	Menganalisa pengaruh dana otsus terhadap disparitas wilayah di provinsi aceh, menganalisa pengaruh PAD terhadap disparitas wilayah di provinsi	Kuantitatif	Indeks theil dan regresi data panel	Dana otsus berpengaruh signifikan dalam menurunkan disparatif wilayah di aceh, akan tetapi kelemahan dana otsus terdapat pada

	Devi Andriyani, Hijri Juliansyah	aceh, menguji pengaruh dana otsus dan PAD secara simultan terhadap disparitas wilayah di Provinsi Aceh			masalah dasar pendidikan dan kesehatan
7	Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi (2019) Muliadi, Khairul Amri	Menganalisa pengaruh penerimaan zakat terhadap kemiskinan dengan menetapkan dana otonomi khusus (otsus) sebagai variable pemoderasi	Kuantitatif	Regresi data panel dan MRA	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan zakat maupun dana otonomi khusus sama-sama memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, secara persial efek negative dana otsus dalam menekan angka kemiskinan terbukti lebih dominan dibandingkan dengan efek negatif yang ditimbulkan oleh penerimaan zakat
8	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (2020) Machfud, Asnawi, Naz'aini	Menganalisa pengaruh dana otsus terhadap tingkat anggaran pendidikan di Aceh, menganalisa pengaruh dana otsus terhadap tingkat kemiskinan di aceh, menganalisis pengaruh anggaran pendidikan terhadap anggaran pendidikan di aceh, menguji anggaran pendidikan sebagai variable <i>mediasi</i> antara dana otsus dan kemiskinan	Kuantitatif, regresi data panel	Data panel (time series +cross section)	Hasil yang didapatkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negative dan signifikan dan dana otsus berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah
9	Analisis Pratek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua (2024)	Untuk menganalisa hubungan antara penerapan otsus dan praktik korupsi dalam sistem birokrasi	Kualitatif Deskriptif	Wawancara secara mendalam terhadap	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mamfaat dana otsus belum memberikan kntribusi

	Bonefasius Bao, PRT Paramma, Anitha Nurak, Hendrik Vallen Ayomi	pemerintahan daerah pasca diberlakukannya kebijakan otonomi khusus tersebut		informan yang dipilih	yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat, sementara kecenderungan praktik korupsi dalam birokrasi pemerintah justru terus menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan dan meluas
10	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017 (2020) Muhammad Kadafi, Murtala	Untuk menganalisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap tingkat kemiskinan dan menguji pengaruh variabelnya secara simultan terhadap kemiskinan periode 2010-2017	Kuantitatif dengan pendekatan empiris menggunakan data skunder	Regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM)	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah maupun dana tnomi khusus tidak memberikan pengaruh sigifikan terhadap tingkat kemiskinan di lingkungan pemerintah Aceh, sedangkan DAU berpengaruh. Secara simultan, PAD, Otsus, DAU berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh
11	Analisis Pemangku Kepentingan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan Pendekatan Mendelow's Matrix (2025) Akhsanul Khalis	Untuk menganalisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana tsus aceh menggunakan Matrix Mendolow (1991)	Kualitatif Deskriptif	Studi pustaka dengan sumber data dari literature akademik (jurnal, penelitian), dokumen resmi (UU, laporan BPK, BPS), laporan lembaga pemerintah	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Aceh dan parlemen Daerah Aceh memiliki keukasaan dan kepentingan yang tinggi, namum dominasi Pemprov dan DPR Aceh belum efektif karena lemahnya koordinasi yang memicu kesenjangan kebijakan dan implementasinya.

Sumber: Data diolah Peneliti

B. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

1. Persamaan

Secara umum penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yakni fokus terhadap kebijakan fiskal daerah, khususnya pada Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterkaitan diantar keduanya terhadap indikator kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kemandirian fiskal daerah. Ringkasnya secara metodologis dan konseptual, penelitian penelitian di atas berada dalam posisi garsi yang sama yaitu kajian yang membahas desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

2. Perbedaan

Selain dari metedo dan jenis pendekatan dalam proses penelitian, kebaruan penelitia ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penetapan titik fokusnya. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pengaruh dana otsus dan PAD terhadap kemiskinan atau indikator pembangunan lainnya tanpa mengkaji secara mendalam melalui variabel anggaran pendidikan. Beberapa penelitian memilih belanja modal dan zakat atau variabel lainnya sebagai indikator dan sebagai mediasinya. Spesifiknya penelitian ini memilih indikator anggaran pendidikan sebagai variabel mediasi yang akan menjelaskan bagaimana dana otsus dan PAD dapat mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Signifikan yang tidak konsisten terhadap hasil penelitiannya mengindikasikan adanya celah (Gap Research) yang perlu dianalisis lebih lanjut dengan model pendekatan lebih komprehensif. Penelitian ini berusaha menjawab celah tersebut dengan menguji pengaruh dana otsus dan PAD secara simultan dan memasukkan pendidikan (anggaran) sebagai variabel mediasi dalam satu model empiris yang terintegrasi.

Dengan demikian, meski memiliki kesamaan tema dan metode pendekatan dengan studi lainnya, kontribusi terbarunya terdapat pada anggaran pendidikan yang berperan sebagai variabel *mediasinya*. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada pemerintah dalam upaya pengetasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

C. Kajian Teori

1. Teori vicious circle of poverty

Dalam ilmu ekonomi lingkaran setan atau lingkaran tak berujung adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat berputar secara melingkar (Wikipedia 2025). Menurut Nurkse dalam Kuncoro (1997:132) menyatakan bahwa pada dasarnya kemiskinan terjadi akibat adanya siklus yang saling mengunci antara kekurangan modal, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, serta minimnya tabungan dan juga investasi, sehingga apabila siklus ini tidak berhasil diputuskan maka rantai kemiskinan akan terus berlangsung secara berulang (Kadji 2004).

Dalam teori ini, intervensi kebijakan dari luar menjadi suatu keharusan agar siklus kemiskinan dapat diputuskan. Dana Otsus dan PAD dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrument fiskal yang berfungsi mengalirkan tambahan modal ke dalam sistem perekonomian Aceh. Dana Otsus sebagai transfer fiskal dari pemerintah pusat hadir untuk mengatasi keterbatasan modal yang pangkal dari lingkaran setan kemiskinan (BAPPEDA 2022). Sementara PAD mencerminkan kapasitas fiskal mandiri daerah dalam membiayai program-program pengetasan kemiskinan secara berkelanjutan (Machfud, Asnawi 2020).

Namun demikian, pengetasan kemiskinan tidak hanya cukup dengan intervensi fiskal semata harus disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Utami 2020). Hal ini sesuai dengan pandangan Sharp et.al dalam Kuncoro (1997:131) menyatakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh pendidikan akan berdampak pada produktivitasnya dan upah yang diterima masyarakat (Kadji 2004). Oleh karena itu, dalam penelitian ini anggaran pendidikan berperan sebagai variabel *mediasi* yang menjadi jembatan antara kebijakan fiskal dan penurunan kemiskinan Aceh.

2. Konsep Kemiskinan

a. Defenisi Kemiskinan

Supriatna (1997:90) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah situasi keterbatasan yang terjadi pada individu atau kelompok bukan atas kemauan diri sendiri. Suatu penduduk dikatakan miskin karena

rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejateraan hidupnya berada dalam lingkaran ketidakberdayaan (Kadji 2004). Kemiskinan terkadang juga diartikan kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang mampu untuk mengatasi kekurangan yang terjadi (Arfiani 2009). Selain itu, ditulis oleh Lestari dan Robiani bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat maupun pribadi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tidak berdayanya masyarakat atau individu untuk memastikan terpenuhi kebutuhan keberlangsungan esok hari (Lestari and Robiani 2023).

Dalam islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi semata, akan tetapi juga masalah sosial dan moral serta spiritual. Islam mengajarkan bahwa kemiskinan bisa menjadi salah satu ujian ketaqwaan dan kesabaran umat dalam menghadapi cobaan hidup tetapi tidak dalam artinya menormalisasikan kemiskinan. Dalam artian tetap melakukan usaha dan menghindari kemiskinan bukan hanya berpasrah diri dalam keadaan miskin, karena perlu adanya pengetasan kemiskinan melalui prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan solidaritas sesama umat (Natsir, Mujiadi, and Hikmah 2024). Seperi yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝۱۱﴾
(الرَّعد/13: 11)

Yang artinya: *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang*

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd/13:11)

Ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, bahwasanya dalam ayat ini tidak hanya sekedar menjelaskan tentang perubahan individu saja, tetapi juga perubahan terhadap sosial. Pada dasarnya perubahan dapat dimulai secara individu, akan tetapi dampaknya tidak berhenti pada level personal. Ketika suatu gagasan atau upaya perbaikan dapat diterima secara luas, maka ia akan berkembang dan mampu mempengaruhi masyarakat luas (Cariustadz.id 2026).

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa penggunaan kata “*qaum*” dalam surat ini dimaknai perubahan tersebut bersifat universal dan kolektif, sehingga relevan dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan dana otonomi khusus dan PAD yang tepat, serta didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam pengetasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pendapat lain yang diberikan oleh Suparlan (2004: 315) bahwa kemiskinan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yakni adanya kekurangan pada sekelompok orang atau suatu daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, serta tidak mampu membebaskan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Disisi

lain Ritonga (2003:1) memdefenisikan kemiskinan adalah suatu keadaan segolongan orang atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau kelayakan bagi kehidupannya. Kebutuhan minimal dan kelayakan yang pantas seperti kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan sosial yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya (Satria, n.d.).

Kemiskinan dalam aspek ekonomi dijelaskan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan terhadap kesejahteraan sekeompok orang. Sedangkan dalam aspek politik kemiskinan dipandang sebagai tingkat akses terhadap kekuasaan, dalam artian tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

b. Jenis-jenis Kemiskinan

Jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan sesuai dengan pegukurannya. Pertama, Absolut kemiskinan yang diukur melalui ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang berada jauh dibawah garis yang telah ditetapkan(Rihadah et al. 2025). Kedua, Relatif jenis kemiskinan yang diukur melalui perbandingan pendapatan dengan standar kehidupan disekitarnya. Ketiga, Kultural yakni kemiskinan yang dipengaruhi oleh nilai budaya seperti malas dan pasrah terhadap keadaan tanpa memanfaatkan hasil yang mudah didapatkan disekitarnya. Keempat, Struktual yakni jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor kebijakan yang kurang adil,

marginalisasi dan juga ketimpangan ekonomi . Kelima, kemiskinan material dan spiritual (Jaenudin and Hamdan 2022). Keenam, kemiskinan wilayah/ sektoral adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan profesi atau lokasi seperti nelayan tradisional yang hanya memiliki pendapatan dibawah garis wajar.

c. Dimensi pengukuran kemiskinan

Menurut Zukifli Husin salah satu ahli atau penulis studi kemiskinan di Indoensia menyatakan dalam Supriatna (1997:83) bahwa kemiskian penduduk diukur menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (RKFM) dengan asumsi dasarnya adalah kebutuhan hidup minimum empat sehat lima sempurna sebesar Rp2.500,00 per kapita per hari, sehingga kebutuhan fisik minimum perbulan $Rp2.500 \times 30 \text{ hari} = Rp75.000,00$ jika hitungan pertahun $Rp2.500 \times 30 \text{ hari} = Rp912.500,00$ (Kadji 2004). Apabila penghasilan yang didapatkan perharinya dibawah angka yang telah ditentukan, maka dogolongkan miskin, karena tingkat pendapatannya hanya berada pada tingkat subsisten (*subsistence level*), yang artinya pendapatan yang dihasilkan hanya cukup untuk mempertahankan hidup, tidak lebih.

Dari segi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemiskinan diukur dari 2 jenis, yaitu Absolut dengan penghasilan di bawah 2 US dollar per hari (sekitar Rp30.338) dan Kemiskinan Menengah yang berpendapat .4 US dollar atau setara dengan Rp 48.541 perharinya. Selain itu BPS menetapkan acuan perhitungan tingkat kemiskinan di

Indonesia di nilai dari pendapat bulanan sejumlah Rp 535.547 dan Rp 17.851 perharinya sebagai pendapatan. dalam artian jika pendapatan yang didapatkan dibawah garis yang telah tertulis digolongkan kategori miskin.

Selain itu, Tingkat kemiskinan di Negara Indonesia diukur melalui melalui 2 metode, yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro adalah suatu metode pengukuran kemiskinan dengan menggunakan *basic needs approach* dan pendekatan moneter, dengan angka dasar kemiskinan senilai 2100 k Kal perkapita perhari ditambah dengan non makanan (STIS 2020). Sedangkan kemiskinan makro adalah konsep pengukuran kemiskinan melalui multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam melakukan perhitungan datanya, dengan angka dasar kemiskinan pada indeks atau PMT dari ciri-ciri rumah tangga. Sasaran rumah tangga yang dituju adalah rumah tangga yang menerima program bantuan sosial seperti BLT, PKH, Raskin dan Jamkesmas serta program-program kemiskinan lainnya. *Basic needs approach*, Salah satu konsep yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat mesikinan pada suatu wilayah.

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun nonpangan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Kategori masyarakat yang tergolong sebagai warga miskin

jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya dibawah garis kemiskinan (Perbendaharaan 2023).

d. Penyebab kemiskinan

Kemiskinan adalah penyakit sosial yang berkepanjangan yang harus dimusnahkan. Keadaan yang membuat sekelompok orang atau daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan pendidikan serta kesehatan. Kurangnya kebutuhan dasar dan sulitnya akses bagi kesehatan dan pendidikan serta pekerjaan menjadikan penyebab berkepanjangannya kemiskinan. Masalah global yang sudah ada sejak dahulu kala, yang dimana pada masa lalu kemiskinan yang diakibatkan oleh minimnya kemudahan dan pengetahuan atau materi. Sehingga berdampak sampai sekarang dimana dunia semakin maju dan modern mereka tidak bisa menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan lainnya yang sudah tersedia (Dinsos, n.d.).

Merujuk pada tulisan Devi Arfiani (2009) menyebutkan diantaranya penyebab kemiskinan adalah, individual atau patologis, keluarga, sub-daya dan agensi serta penyebab struktural yang menjadikan faktor struktural sosial sebagai sebab kemiskinan (Arfiani 2009). Menurut Kuncoro dalam (Itang 2014) secara makro kemiskinan terjadi akibat kepemilikan sumber daya yang tidak merata, sebagian penduduk hanya memiliki sumber daya dengan jumlah sedikit sehingga pendapatan yang diperoleh juga dalam jumlah sedikit dan tidak cukup. Diakibatkan

perbedaan kualitas sumber daya yang berbeda. Perbedaan akses dan modal, akibat ketiadaan dan ketidakmampuan menjadikan manusia tidak punya pilihan dalam upaya mengembangkan kehidupannya.

3. Dana Otonomi Khusus Aceh

Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah salah satu kebijakan fiskal yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan khusus untuk daerah-daerah terpilih untuk pelaksanaan pembiayaan dengan tujuan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli serta dapat memperbaiki layanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan juga infrastruktur (Tahun 2025). Islam menanggapi bahwa dana otonomi khusus adalah sebuah bentuk kebijakan fiskal pemerintah yang diperbolehkan (mubah), jika proses pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial serta ekonomi. Dana otsus bukan hanya merupakan dana transfer fiskal dari pusat untuk daerah melainkan juga sebuah amanah yang harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab (Anwar 2023).

a. Dasar Hukum Dana Otsus

Perundingan yang diinisiasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999-2000 adalah sebuah langkah awal yang dilakukan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh. Gagasan ini tidak hanya membuka ruang dialog bagi Pemerintahan

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi juga melibatkan pihak internasional sebagai moderator dalam proses perdamaian. Proses negosiasi yang dilalui akhirnya mencapai titik kulminasi pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Di Helsinki, yang secara resmi mengakhiri konflik bersenjata selama kurang lebih 29 tahun antara RI dan GAM (Tolikara, n.d.)(Khalis 2025). Setelah melalui proses yang panjang, penetapan daerah berotonomi khusus bagi wilayah Aceh disahkan pada tahun 2001 sebagai bentuk desentralisasi asimetris atau strategi penghentian konflik. Hal ini diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diperbaiki menjadi UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang kemudian disingkat menjadi UU PA No 11/2006 yang menjadi dasar hukum Otsus Aceh sampai sekarang (Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro 2018).

Pasal 183 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan sebuah pemberian yang diterima oleh pemerintah Aceh dengan tujuan pembiayaan pembangunan, terutama pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Dijelaskan dalam Pasal 183 ayat (2) bahwa berlakunya dana Otsus ini untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun 15 diberikan 2% palfon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional (DAUN) dan (2) ditahun

selanjutnya sampai berakhir ditahun 2027 besaran dana yang diberikan setara dengan 1% plafon DAUN (Akuntabilitas et al. 2020).

b. Tujuan dan Skema Penyaluran

Penetapan status otonomi khusus bagi wilayah didasarkan pada 3 aspek tujuan, yakni aspek politik, sejarah dan sosial ekonomi yang secara integral menjadi landasan dalam perumusan kebijakannya. Secara politik, tujuan otsus adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mencegah berkembangnya isu separatisme dan disintegrasi. Ditinjau dari aspek historis, Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah perjuangan dan pembangunan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi rakyat Aceh yang memberikan 20 kilogram emas untuk pembelian pesawat pertama Indonesia “Dakota RI-001 Seulawah”. Dari segi sosial ekonomi, pemberian otsus ini dalam rangka membantu pembangunan ekonomi aceh yang tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, akibat yang muncul dari konflik yang berkepanjangan dan dilanjutkan dengan bencana tsunami pada tahun 2004 (N. L. L. A. dan H. Cahyono 2018). Ditegaskan kembali oleh R. Siti Zuhro dalam tulisannya menyatakan bahwa, tujuan otsus dari segi ekonomi adalah untuk mengoptimalkan peningkatan pada kemampuan Pemda dalam melakukan penyediaan layanan publik yang lebih profesional, terangkau, efisien, dan efektif (Zuhro 2018b).

Semenjak disahkan UU No 11 2006, pengelolaan dana otsus dilaksanakan dengan 3 model tata kelola administrasi. Pertama, model terpusat 2008-2010 dengan pengawasan penuh dibawah wewenang pemerintahan Aceh, akan tetapi model ini dianggap kurang optimal dalam merespon tantangan serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada. Kedua, model pagu alokasi kabupaten/kota sejak 2010- qanun No 2 tahun 2008 dengan penyaluran dana dalam bentuk transferan langsung kepada kabupaten/ kota, yang kemudian pemebintahan kabupaten/ kota yang menetapkan pagu anggaran yang akan dikeluarkan untuk tiap-tiap daerah, kabupaten/kota diberikan wewenang penuh dalam pelaksanaan program dan pengalokasian dana otsus namun tetap alam pengawasan provisi. Ketiga, transferan langsung yang dikirim dari pemerintah pusat kepada pemerintahan kabupaten/kota, sesuai dengan perubahan Qanun No 2 2008 menjadi Qanun No 2 2013 pemeritahan kabupaten/kota memiliki wewenang penuh dalam upaya pengelolaan dan pelaksanaan dana otsus. Tujuan perunahan Qanun ini untuk meningkatkan efektivitas serta reponsivitas pembangunan daerah (Bappeda Aceh 2015). Penyaluran dana yang dimulai sejak tahun 2008 dan ditargetkan akan berakhir di tahun 2027. Besaran dana Otsus tersebut ditetapkan berdasarkan persentase dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional (DAUN), yakni sebesar 2% untuk jangka waktu 15 tahun pertama (2008-2022), kemudian mengalami penurunan menjadi 1% untuk 5 tahun terakhir (2023-2027) (Ananto et al. 2018). Melalui

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengaturan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) diberikan pada pemerintah pusat, yang sebelumnya mekanisme penyaluran dana diatur oleh PMK Nomor 76/PMK,07 / 2022 bahwa penyaluran dana dilakukan secara bertahap melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RUKD) Provinsi Aceh. Akan tetapi kebijakan ini dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 33 Tahun 2024, sekaligus memperkenalkan konsep baru Dana Otsus yakni Dana Otsus yang bersifat umum dan yang berbasis kinerja pelaksanaan (Summary 2027).

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Konsep PAD dan komponennya

Menurut Halim (2007) dalam (Nasir 2019) PAD merupakan pungutan penerimaan dari daerah masing-masing yang dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Dijelaskan juga oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kemnetrian Keuangan PAD adalah suatu pendapatan Daerah yang diperoleh dari pungutan yang berdasarkan kepada peraturan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak yang mencakup hasil perusahaan daerah, serta penerimaan dari investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dikalkulasikan dalam bentuk rupiah setiap tahunnya (“Kementrian Keuangan, “Pendapatan Daerah,” n.d.). PAD yang dijadikan sebagai

instrument fiskal yang mengeluarkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Kewenangan ini merupakan sebuah manifestasi dari prinsip desentralisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus daerah secara lebih mandiri dan akuntabel (“Pendapatan Asli Daerah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” n.d.).

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 menegaskan bahwa komponen-komponen PAD terdiri atas penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Komponen lainnya juga berasal dari pemberian pemerintah yang diatur sesuai dengan Undang-Undangnnya meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, pendapatan daerah lain yang disahkan (Nasir 2019). Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan, maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transferan dana dari pihak eksternal, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya (Gede and Artini 2017). Secara teoritis, dijelaskan oleh Wallace E. Oates desentralisasi dapat memungkinkan pemerintahan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena memiliki informasi yang lebih kuat mengenai preferensi lokal (Fiskal et al., n.d.)

b. Definisi PAD menurut islam

Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai alat untuk kemaslahatan umum yakni untuk mensejahterakan sosial dan kemandirian suatu daerah dengan sistem pengelolaan sesuai ketentuan islam. Dalam perspektif islam PAD diperbolehkan selama proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat dan bersumber dari hal-hal yang halal, tidak menzalimi masyarakat dan dapat dikelola secara adil dan transparan (Rihadatul Aisi 2026). Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (Sayahafiz.com 2023), dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara amanah dan transparan, serta dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Anggaran pendidikan Sebagai Variabel Mediasi

Variable *mediasi* adalah sebuah variable yang berperan sebagai perantara atau mediator yang terletak diantara variabel dependend dan independen dalam suatu hubungan atau model penelitian. Dalam peneitian ini variable *mediasi* dimaknai sebagai jembatan yang menghubungkan antara PAD dan kemiskinan Secara koseptual variabel *mediasi* adalah variable yang menjelaskan bagaimana atau mengapa perubahan pada varibel bebas dapat mempengaruhi variable terkait (A 2023). Dalam

penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Dikarenakan indikator ini dinilai cukup relevan dengan fokus penelitian yang menekankan kebijakan fiskal daerah.

a. Pendidikan dalam Perspektif islam

Dalam pandangan islam pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan yang diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan individu melalui dimensi akal, fisik dan spiritual (Afandi 2024). Pendidikan adalah salah satu kebutuhan penting bagi manusia selayaknya kebutuhan lainnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan yang harus terpenuhi, (Syafrin et al. 2023). Gagasan tersebut merujuk pada ayat Al- Quran dalam surat An-Nahl yang menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun yang hanya dianugerahi pendengaran, penglihatan dan hati agar manusia bersyukur.

b. Pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan menurut teori dan empiris

Dalam kerangka teori Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997), anggaran pendidikan menempati posisi yang sangat strategis sebagai instrument kunci dalam lingkaran memutuskan lingkaran setan kemiskinan. Nurkse menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi, sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan juga rendahnya pendapatan. Salah satu titik paling krusial dalam siklus ini

adalah rendahnya investasi pada sumber daya manusia, yang secara langsung dipengaruhi oleh besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Secara lebih spesifik, Sharp et al. dalam Kuncoro (1997: 131) menegaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh minimnya investasi pada sektor pendidikan akan berdampak langsung pada rendahnya produktivitas kerja dan upah yang diterima masyarakat. Kondisi ini mempertegas bahwa anggaran pendidikan bukan sekedar pos belanja rutin pemerintah daerah, melainkan instrument investasi fiskal yang paling strategis untuk memotong mata rantai kemiskinan dari sumbernya. Ketika anggaran pendidikan ditingkatkan secara signifikan, akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas semakin terbuka, ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja meningkat, produktivitas bertambah, dan pada akhirnya pendapatan individu meningkat sehingga siklus kemiskinan dapat diputuskan secara nyata dan berkelanjutan.

Selain teori diatas, teori (*endogenous growth theory*) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara mandiri dan berkelanjutan jika adanya faktor pendukung internal seperti investasi dalam penelitian, pengembangan dan pendidikan serta inovasi. Secara teori klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor ketersediaan produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang artinya jika faktor produksi tersedia, maka faktor produksi akan terpenuhi dengan adanya

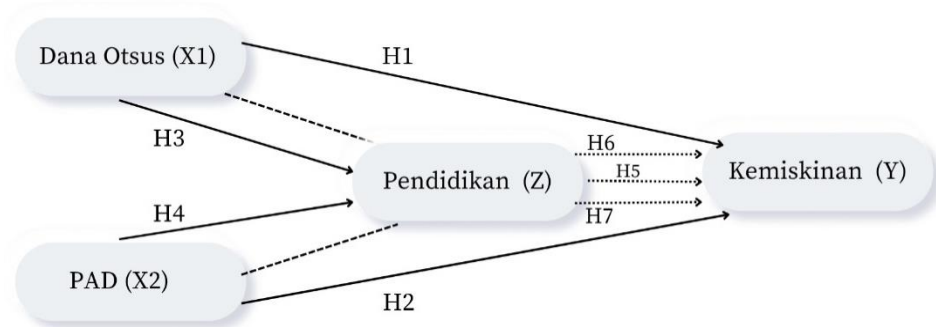
lahan yang layak, modal yang cukup serta tenaga sumber daya manusia yang sesuai. Pendidikan merupakan sebuah faktor krusial yang secara teoritis dan empiris berperan penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sdm dan produktivitas (Center, n.d.). Sejalan dengan gagasan Klador, Lucas dalam McMahon 2002 yang diikuti oleh (Subroto 2014) mengatakan bahwa pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah capital dan tenaga kerja yang berkualitas.

Ditinjau dari segi empiris, berbagai penelitian terdahulu membuktikan hubungan negative dan signifikan antara anggaran pendidikan dan kemiskinan. Rika Pertiwi dkk (2025) dalam penelitiannya membuktikan bahwa alokasi anggaran pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Senada dengan penelitian Natasya dkk (2025) juga menemukan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh periode 2013-2024.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori sebelumnya, untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berikut kerangka pemikirannya:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Peneliti

Model hubungan:

- a. Dana Otsus → Kemiskinan
- b. PAD → Kemiskinan
- c. Anggaran pendidikan → Kemiskinan
- d. Dana Otsus → Anggaran pendidikan
- e. PAD → Anggaran pendidikan

E. Hipotesis Penelitian

Secara sederhana hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani *hypo* yang artinya adalah dibawah dan *thesis* pendirian, kepastian atau pendapat yang tegak, jika dimanai dengan bebas hipotesis adalah sebuah pendapat kebenaran yang masih diragukan. Untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan pendirian yang tepat, oleh karena itu dalam penelitian perlu dilakukan uji hipotesis (Surabaya, IMT-FSD), and Boulevard, n.d.) dan secara statistika hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan dari porelahan data yang dihasilkan (P. D. Sugiono 2021). Berdasarkan kajian

terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti, yaitu:

1. Pengaruh atau tidak Dana Otsus terhadap Penurunan Kemiskinan

Sejalan dengan teori *Public Expendeture Theory Paun&Bruzeanu* (2013) yang menyatakan bahwa belanja publik yang diarahkan ke sektor yang strategis akan berpotensi mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan (Brezeanu 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novita Anastasya (2023), membuktikan bahwa dana otsus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana tersebut berkontribusi pada perbaikan kualitas masyarakat. Sejalan dengan hal ini, peningkatan IPM yang didorong oleh dana otsus seharusnya turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (Boky 2023).

Di sisi lain, penelitian Ikbal dkk (2020) menunjukkan bahwa dana otsus belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh. Besarnya alokasi dana tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, karena penggunaa dana yang tidak tepat sasaran, sehingga angka kemiskinan masih relatif tinggi(Ikbal Ramzani, Muhammad Yasir Yusuf 2020). Kondisi ini sesuai dengan konsep dasar *Stakeholder Theory*, dalam Freeman (1984), yang menegaskan bahwa penciptaan nilai bagi masyarakat hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan berkoordinasi secara efektif dan bertanggung jawab atas dampak kebijakan yang diambil (Freeman and Management 1984).

Berdasarkan gap empiris tersebut, penelitian ini merumuskan uji hipotesis penelitian berikut:

H1: Dana Otsus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kemiskinan

Rostow (1959) dalam teorinya tentang tahap pertumbuhan ekonomi (*The Strages of Growth*) menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumber daya dan menginvestasikannya pada sektor-sektor strategis, terutama melalui pembangunan *social overhead capital* (Rostow 1959). Penelitian terbaru Latif & Marna (2026) secara empiris menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh pada periode 2015-2024, temuan ini membuktikan bahwa besarnya alokasi dana tidak akan bekerja dengan efektif jika tidak disertai dengan penyaluran yang tepat dan tata kelola yang benar (Abdul Latif 2026). Pada penelitian Meysinta & Aini (2025) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Barat, dimana setiap kenaikan PAD sebesar 1% mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,164% (Meysinta and Aini 2025). Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian berikut:

H2: PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

3. Pengaruh Dana Otsus terhadap Anggaran pendidikan

Salah satu pengalokasian data otsus adalah sektor anggaran pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 183 ayat (1) UUPA “ penyaluran Dana Otsus dituju untuk pembiayaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan dan sosial juga kesehatan (H. Cahyono 2018b).

Hal ini secara tidak langsung dibuktikan dalam penelitian Farathika (2020) yang menjelaskan bahwa salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah anggaran pendidikan. Mengacu pada konsep Davies dan Quinlivan (2006), IPM mengukur kemampuan penduduk dalam menjalani kehidupan yang berkualitas, termasuk mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Utami 2020). Dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu dari penyaluran dana otsus adalah sektor anggaran pendidikan dengan tujuan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu memperoleh pekerjaan yang layak, dari argumen tersebut uji hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: dana Otsus berpengaruh terhadap anggaran pendidikan.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendidikan

Salah satu prioritas dana PAD yaitu sektor pembiayaan pelayanan publik untuk meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan dan anggaran pendidikan (DJPb 2021). Secara teoritis, Oates (2006) melalui *Decentralization Theorem* menegaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal melalui sumber pendapatan sendiri (*own-revenue*) akan lebih mampu mengalokasikan pengeluaran publik secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, termasuk pada sektor anggaran pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Oates 2006). Teori tersebut dibuktikan oleh penelitian Arispen dan Rahmi (2021) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengali sumber pendapatan asli, semakin besar kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik yang mendukung peningkatan dan kualitas masyarakat, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan (Arispen et al. 2020). Berdasarkan teoritis dan bukti empiris tersebut, uji hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan

5. Pengaruh Anggaran pendidikan terhadap Kemiskinan

Rendahnya investasi pada anggaran pendidikan merupakan salah satu mata rantai yang memperpanjang siklus kemiskinan. Oleh karena itu,

peningkatan anggaran pendidikan adalah instrument kunci untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan, karena dengan adanya peningkatan yang diberikan pada anggaran pembelajaran daerah diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan pendidikan sehingga dapat menghasilkan kualitas dan akses pendidikan yang layak. Penelitian Rika Pertiwi dkk (2025) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh (Pertiwi et al. 2025). Temuan ini diperkuat oleh Natasya dkk (2025) bahwa indeks pendidikan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2013-2024 (Balqis et.al 2025). Selain itu, Frayanti (2023) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa IPM yang didalamnya mencakup pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di 23 kabupaten/kota Aceh. Maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

6. Apakah Anggaran pendidikan Memediasi Dana Otsus terhadap Penurunanan Kemiskinan

Secara teoritis, Nurkse dalam Kuncoro (1997:132) menyatakan bahwa pada dasarnya kemiskinan terjadi akibat adanya siklus yang saling mengunci antara kekurangan modal, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, serta minimnya tabungan dan juga investasi, sehingga apabila siklus ini tidak berhasil diputuskan maka rantai kemiskinan akan terus

berlangsung secara berulang (Kadji 2004). Anggaran pendidikan dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrument yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia dalam upaya memutuskan lingkaran kemiskinan.

Secara empiris, dana Otsus tidak secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan akan tetapi juga dipengaruhi oleh peningkatan pada anggaran pendidikan, dalam penelitian (Along Timang Tandiboyong 2024) memperoleh hasil bahwa dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama perbaikan melalui jalur pendidikan dan kesehatan yang layak. Sugiharjo dkk (2022) juga menemukan bahwa dana otsus terbukti signifikan dalam memoderasi pengaruh pendidikan terhadap penurunan kemiskinan (Sugiharjo et.al), serta Wijaya dkk (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu variabel mediasi utama dalam jalur pengaruh dana otsus terhadap kesejahteraan masyarakat (Wijayanti, et.al 2021). Dari hasil diatas diputuskan uji hopitesisnya adalah sebagai berikut:

H6: anggaran pendidikan memediasi pengaruh Dana otsus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

7. Apakah Anggaran pendidikan Memediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan daerah, salah satunya melalui sektor anggaran pendidikan. Menurut Halim (2004), semakin tinggi PAD suatu daerah maka

semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik secara mandiri, termasuk layanan pendidikan (Dermawan 2016). Dalam penelitian Malinda (2020), menyatakan bahwa daerah yang berhasil mengelola PAD dengan baik akan berdampak efisien terhadap keuangan daerahnya. Artinya, PAD yang dikelola secara efisien memungkinkan pemerintah daerah membelanjakan anggarannya sesuai kebutuhan, termasuk untuk sektor pendidikan (Malinda Sari 2020). Dalam penelitian ini, anggaran pendidikan berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan PAD dengan penurunan kemiskinan, dengan ini hipotesis yang diajukan adalah:

H7: Anggaran pendidikan sebagai mediasi pengaruh dana PAD terhadap kemiskinan

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini Peneliti menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian hipotesis, serta definisi operasional variable.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (explanatory research). Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk mencari tau populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, proses analisa data yang bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan utama dapat menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (prof. dr. Sugiono 2022). Menurut Sugiyono dalam (Sari et al. 2023) mengemukakan bahwa pendekatan explanatory research adalah jenis pendekatan dengan tujuan penelitian menjelaskan hubungan kausal, pengaruh, juga asosiasi anatarvariabel melalui uji hipotesis dengan data numerik dan analisis statistik.

Dalam penelitian ini tujuan penggunaan pendekatan explanatory research adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara dana otonomi khusus (X1), Pendapatan Asli Daerah PAD (X2) yang berperan sebagai

variabel independen terhadap penurunan kemiskinan (Y) variabel dependen di Provinsi Aceh baik secara langsung atau tidak serta menetapkan anggaran pendidikan sebagai variabel mediasinya. Pada proses penelitian ini, bentuk data yang dipilih merupakan data panel, yakni gabungan diantara dua data dari runtut waktu (*time series*) juga data silang (*cross section*) dengan harapan dapat memudahkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika antar waktu dan antar wilayah.

B. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah provinsi Aceh, dikarenakan Provinsi ini merupakan daerah yang berstatus otonomi khusus, sekaligus penerima dana otsus yang cukup besar pada setiap periodenya. Tercatat 23 kabupaten/kota seluruh Aceh menerima dana Otsus dan memiliki kewenangan mengatur PAD sesuai dengan kebutuhan dan keperluan adat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini provinsi Aceh ditetapkan sebagai populasi yang akan diukur dan diteiti dengan jumlah 23 daerah yang menerima dana otonomi khusus mulai tahun 2019 samapai 2025 dengan 3 variabel lainnya yaitu kemiskinan, PAD dan anggaran pendidikan sebagai variabel mediasinya.

2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Non-Probability sampling, spesifiknya merujuk pada sensus/ sampling total. Pemilihan

teknik ini dikarenakan jumlah populasi yang jumlahnya dibawah 100 tepatnya seluruh populais dijadikan sebagai sampel penelitian (P. D. Sugiyono 2022).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data utama yang digunakan adalah sekunder. Menurut Sugiyono (2016) dan Jonathan Sarwono (2005) berpendapat data yang bersifat sekunder adalah data-data yang tidak diperoleh secara langsung pada sumbernya, melainkan data yang telah disediakan melalui dokumen, laporan, atau publikasi resmi (Ubm 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah alokasi data Otsus, jumlah dana PAD serta Anggaran yang ditujukan pada sektor pendidikan di Provinsi Aceh pada periode 2019-2025 yang dikutip pada publikasi lembaga resmi seperti Badan Pusat Statiska (BPS), dan publikasi resmi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, sera websate resmi lainnya yang mendukung dan menyediakan data sesuai dengan variabel penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Satori dan Aan Komariah (2011:103), teknik pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kerluan penelitian (Luqman Hakim 2024). Dalam pengumpulan data sekunder metode perolehan data tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga seperti dokumen, atau arsipan serta akses websate resmi yang yang sesuai dengan keperluan penelitian (Ubmadmin 2021). Dalam penelitian

ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui websate resmi seperti BPS, BAPEDDA, DJPK serta jurnal ilmiah lainnya.

F. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel (DOV), merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menejlaskan makna suatu variabel secara spesifik, untuk dapat mengetahui indikator dan cara pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian (Nico 2016).

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisis Variabel	Indikator
1.	Dana Otoomi Khusus (X1)	Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh selaku daerah yang memiliki status otonmi khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah dana otsus yang diterima kabupaten/kota pertahun (Rupiah) (Pemda 2024)
2.	Pendapatan Asli Daerah PAD (X2)	Keseluruhan pendapatan yang bersumber dari potensi dan kekayaan daerah itu sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah PAD kabupaten/kota per tahun (Rupiah) (Pemda 2024)
3.	Anggaran pendidikan (Z) <i>variabel mediasi</i>	Jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah	Jumlah anggaran yang diterima untuk pendidikan (Rupiah) (Pemda 2024)
4.	Kemiskinan (Y)	Kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi standar kebutuhan dasar yang diukur berdasarkan standar garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin kabupaten/kota per tahun % (Statistik 2026)

Sumber: Data diolah Peneliti

G. Teknik Analisis Data

Path Analysis (analisis jalur) merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan sebab-akibat kompleks pada setiap variabel penelitian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode ini adalah suatu metode yang memodelkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel *mediasi*. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas (independen) yaitu dana otsus dan dana PAD, satu variabel terikat (dependen) yaitu kemiskinan serta satu variabel *mediasi* yaitu anggaran pendidikan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan perangkat lunak statistika **EViews**. Penggunaan alat ini untuk membantu peneliti dalam melakukan pengolahan data kuantitatif serta analisis ekonometrika seperti uji klasik, analisis linear berganda, pengujian hipotesis dan juga koefisien determinasi, dengan rumus:

$PD = \alpha + \beta_1 DO + \beta_2 PAD + e$ (untuk mengetahui pengaruh dana otsus dan PAD terhadap anggaran pendidikan)

Keterangan:

Z= Anggaran pendidikan (PD)

X1= Dana Otsus (DO)

X2= PAD

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e= eror

$Y = \alpha + \beta_1 DO + \beta_2 PAD + \beta_3 PD + e$ (untuk mengetahui pengaruh dana otsus, PAD, dan anggaran pendidikan terhadap kemiskinan)

Keterangan :

Y= Kemiskinan

X₁= Dana Otsus

X₂= PAD

Z= Anggaran pendidikan

Langkah-lagkah analisis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meringkas dan mendeskripsikan data dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perolehan data sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan (University 2024). Menurut Sugiyono, statistik deskriptif merupakan ringkasan yang dapat mendeskripsikan atau memberi gambar terhadap obyek yang diteliti melalui sampel dan populasi yang ada, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (P. Sugiyono 2023). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik data pada variable yang diuji yaitu dana otsus, PAD, anggaran pendidikan, dan kemiskinan.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah sebuah model yang menjelaskan hubungan antara satu variable terikan atau respons (y) dengan

dua atau lebih variable bebas atau predictor ($x_1, x_2, \dots, x_n$) dengan tujuan agar dapat memprediksi nilai variabel terikat (y) berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Selain untuk menjelaskan hubungan antar variabel, regresi linear berganda juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Yuliara 2016). Dengan demikian penggunaan regresi berganda dikarenakan penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas yaitu dana otsus, PAD, anggaran pendidikan serta untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = a + b_1DO + b_2PAD + b_3PD + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (kemiskinan)

a = konstanta

$b_{1,2,3}$ = koefisien regresi

X_1 = Dana otsus

X_2 = PAD

X_3 = Anggaran pendidikan

e = eror

3. Analisis Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik adalah serangkaian pengujian dalam analisis data kuantitatif dengan tujuan untuk memastikan bahwa model statistik yang digunakan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sehingga dapat memperoleh hasil yang valid dan reliabel (Iba and Wardhana 2024). Dalam

praktiknya terdapat 4 jenis asumsi klasik, yaitu: normalitas, homogenitas varians (homoskedastisitas), autokorelasi, multikolinearitas (Hari Sugiharto Setyaedhi, Rusijono, n.d.). Untuk mengetahui apakah data residul berdistribusi dengan normal uji yang digunakan adalah Uji Normalitas dengan metode Kolmogrov-Smirnov dengan pendekatan Montecarlo/Shapiro- Wilk, dengan dasar keputusan:

$\text{Sig} > 0,05$ = data berdistribusi normal

$\text{Sig} < 0,05$ = data tidak normal

Juga menggunakan Uji Multikolinearitas untuk mengetahui apakah antar variabel bebas saling berkorelasi tinggi dengan rumus:

Rumus Tolerance $Tolerance = 1 - R^2$

Rumus VIF $VIF = \frac{1}{Tolerance}$

Kriteria :

$Tolerance > 0,10$

$VIF < 10$

Uji heteroskedastisitas, untuk mengetahui apakah terjadinya ketidaksamaan varians residul dengan metode uji Gleser $|e| = a + b X$

Kriteria:

$\text{Sig} > 0,05$ = tidak terjadi heteroskedastisitas

H. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui uji hipotesis. Sesuai dengan hipotesis yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, dengan itu dalam penelitian ini memiliki 7

hipotesis. Jenis uji yang pertama yaitu uji t digunakan untuk *mengetahui* bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta bagaimana variabel mediasi berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses pengaruhnya.

$$t = \frac{b}{SE(b)}$$

Keterangan :

B= koefisien regresi

SE (b)= standar eror

Kriteria :

Sig < 0,05 = H0 ditolak

Sig > 0,05 = H0 diterima

Selanjutnya uji f (simultan), yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R²= koefisien derteminasi

K = jumlah variabel independen

N = jumlah sampel

Kriteria :

Sig < 0,05 = model regresi signifikan

Serta yang terakhir yaitu uji Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen dengan nilai yang berkisaran antara 0-1 (0%-100%), jika nilai semakin mendekati 1 maka akan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Iqbal 2023). Penggunaan R^2 dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan model penelitian dan juga untuk menjelaskan berapa persen variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Keterangan:

SSR= Sum of Squares Regression

SST= Total Sum of Regression

Nilai R^2 berada antara

$0 \leq R^2 \leq 1$ (R^2 mendekati 0= model baik, R^2 mendekati 1= model lemah)

I. Analisis Variabel Mediasi (Uji Sobel)

Uji sobel merupakan sebuah uji yang dirancang untuk menguji kesignifikan dari efek mediasi atau pengaruh tidak langsung dalam sebuah model persamaan struktural, pendekatan ini merujuk pada pengembangan statistic yang dipopelerkan oleh *Sobel* (1982) dan dikembangkan oleh *Wolfe* dan *Ethington* (1985) yang berhasil menurunkan distribusi asimtotik dari efek tidak langsung untuk uran sampel besar dalam model persamaan strktual (Ethingto 1985). Dalam penelitian ini uji sobel dilakukan pada kekuatan

pengaruh tidak langsung variabel independen (otsus, PAD) terhadap variabel dependen (KMS) melalui variabel mediasi atau *interveving* (PDDK).

$$t = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE^2) + (a^2 SEb^2)}}$$

Keterangan :

a: Jalur variabel independen terhadap variabel mediasi

b: jalur variabel mediasi terhadap variabel dependen

SE: standar error

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Pada bab ini akan disajikan paparan data dan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil dari analisis regresi data panel terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019-2025.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Secara geografis, provinsi ini memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Teluk Benggala dan Samudra Hindia di sisi barat dan selatan, Selat Malaka di sisi Utara, serta Provinsi Sumatera Utara di sisi timur dan tenggara (P. P. Aceh 2023). Provinsi dengan luas 29.611,11 km perairan dan 57.365,67 km daratan yang diatas nya berdiri 23 kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian dalam studi ini (Maulana 2023).

Aceh menjadi salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dibandingkan provinsi lainnya, keistimewaan ini tidak lahir dengan cara sederhana, melainkan lahir dari konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berdiri di bawah pimpinan Hasan di Tiro melawan pemerintahan pusat yang berlangsung hamper 3 dekade (1976-2004), kekacauan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat

terkait ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan (Wikipedia 2026a).

Melalui mediasi pihak internasional, pemerintahan pusat dan GAM akhirnya mencapai kesepakatan damai setelah melakukan perundingan selama 25 hari di Vantaa, Finlandia. Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki secara resmi ditandatangani pada 15 Agustus 2005, yang menandakan bahwa berakhirnya konflik sekaligus membuka jalan bagi pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh (Salwa 2024). Sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menjadi landasan hukum utama pelaksanaan otonomi khusus hingga saat ini, termasuk didalamnya pengaturan mengenai dana otonomi khusus sebagai instrument fiskal untuk mencapai pemulihan dan pembangunan Aceh pascakonflik (Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro 2018).

2. Kondisi Kemiskinan di Aceh (2008-2025)

Selama periode 2008-2025 kemiskinan di Aceh menunjukkan tren penurunan, namun tetap berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera (Safrinja et al. 2025). Pada tahun 2008, persentase penduduk miskin di Aceh tercatat 23.53 persen dan mengalami penurunan bertahap hingga menjadi 12.64 persen pada September 2024 (Statistik 2026). Meskipun demikian, angka ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi sumatera lainnya, seperti Kepulauan Riau hanya 5.08 pada periode yang sama.

Tabel 4.1 Perkembangan Persentase Kemiskinan di Aceh (2008-2024)

Tahun	Persentase Kemiskinan (%)
2008	23.53
2012	18.58
2016	16.43
2020	15,43
2022	14,75
2024	12,64

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah peneliti

Disparitas kemiskinan antarkabupaten/kota di Aceh juga masih mencolok. Sejumlah wilayah kabupaten pendalam dan pesisir terpencil masih berada pada tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lebih maju (Hartika 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan selama ini, termasuk dana otsus, belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata (Lestari and Robiani 2023).

a. Perkembangan Dana Otsus di Aceh

Dana otsus mulai dialirkan ke Provinsi Aceh sejak tahun 2008 berdasarkan amanat UUPA pasal 183 ayat (1), bahwa besaran dana yang ditetapkan sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) pada periode 2008-2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 1 persen untuk periode 2023-2027 (H. Cahyono 2018b). Sejak disahkannya UUPA pasal 183 tersebut dana yang telah diterima oleh Aceh mencapai Rp104,23 triliun (Humaskemenko Polhukam RI 2025) dan diproyeksikan Aceh akan menerima total

sekitar Rp163 triliun hingga program ini berakhir pada tahun 2027 (H. Cahyono 2018b).

Lebih lanjut, pergeseran yang signifikan dalam besaran pagu dana otsus yang diterima Aceh. Pada periode awal pengalokasian, Aceh sempat menerima sekitar Rp7.5 triliun pertahun. Namun sejak tahun 2023, dana yang diterima hanya sekitar Rp3.9 triliun hingga Rp4 triliunn per tahunnya, penurunan ini terjadi seiring dengan berakhirnya periode pertama dana otsus yang dialokasikan 2 persen dari plafon DAUN dan beralih menjadi 1 persen (Safrina 2024).

b. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2008-2025 secara umum menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan pertumbuhan yang tidak merata antar daerah (Dian Maulana Rizki, Zikriatul Ulya 2026). Kabupaten/kota yang memiliki sektor ekonomi lebih berkembang, seperti Banda Aceh dan Aceh Utara, cenderung mencatat PAD yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di pedalaman. Rata-rata PAD kabupaten/kota di Aceh masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah luar Aceh (Abdul Latif 2026). Hal ini mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat termasuk dana otsus dan dana alokasi umum (Nurjannah 2025).

Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam membiaya program-program pembangunan secara

mandiri (Abdul Latif 2026). Namun demikian, beberapa kabupaten/kota berhasil meningkatkan dana PAD nya melalui optimilisasi pajak daerah dan retribusi, yang pada akhirnya memberikan ruang fiskal lebih besar untuk belanja di sektor anggaran pendidikan dan sosial kemasyarakatan (Machfud, Asnawi 2020).

c. Perkembangan Anggaran pendidikan di Aceh

Anggaran pendidikan yang digunakan sebagai indikator variabel *mediasi (z)* dalam penelitian ini mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Secara ketentuan hukum minimal 30 persen dari dana otsus harus dialokasikan untuk sektor anggaran pendidikan (Suryani 2018). Pada taun 2023, total APBA yang dialoasikan untuk sektor anggaran pendidikan tercatat sekitar 2.7 triliun (Ladayani 2023). Alokasi dana yang diterima oleh Aceh terus mengalami peningkatan dari tahu ketahun, akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran tesebut belum berbanding lurus dengan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Penelitian Safrida dkk (2021) membuktikan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran pelaksanaan program, minimnya kerja sama antara dinas pendidikan dan masyarakat, serta terbatasnya kualitas maupun kuantitas tenaga kerja pengajar wilayah terpencil (Safrida 2021).

Kondisi ini juga ditemukan oleh Hesty dkk (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber pendanaan utama sekolah dari anggaran pemerintahan daerah dan dana BOS seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan pembangunan, sehingga pihak sekolah ikut mencari sumber pendanaan alternatif lainnya (Nora et al. 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Aceh secara nominal belum berbanding lurus dengan pemerataan kualitas layanan pendidikan di tingkat kabupaten.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan, yaitu Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pendapata Asli Daerah (PAD), Anggaran pendidikan (PDD) dan Kemiskinan (KMS) pada 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh selama periode 2019-2029. Melalui jalur ini, peneliti mengetahui nilai rata-rata, nilai tengah, maksimum, minimum serta nilai standar deviasi dari masing-masing variabel, sehingga dapat memahami bagaimana sebaran dan variasi data antar daerah selama periode penelitian. Hasil analisis dalam penelitian ini didapatkan dari hasil olah data yang dilakukan menggunakan aplikasi EViews 14 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Statistik	Otsus	PAD	PDDK	KMS
Mean	102.000.000.000	133.000.000.000	18.300.000.000	14.836%
Median	78.000.000.000	121.000.000.000	16.400.000.000	14.660%
Maximum	966.000.000.000	404.000.000.000	89.000.000.000	20.780%
Minimum	3.490.000.000	18.200.000.000	140.000.000.000	5.450%
Std. Dev.	138.000.000.000	69.800.000.000	21.100.000.000	3.410%

Sumber: Data diolah Peneiti (2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah observasi sebanyak 161 data yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di prvisi Aceh selama periode 2019-2025, hasil yang didapat menyatakan bahwa:

Pertama, Variabel Dana Otsus (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp102.000.000.000 dengan nilai median sebesar Rp78.000.000.000, nilai maksimum sebesar Rp966.000.000.000, nilai minimum sebesar Rp3.490.000.000, dan standar deviasi sebesar Rp38.000.000.000, dengan nilai hasil deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa terdapat variasi penyebaran dana otsus yang besar antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Kedua, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp133.000.000.000 dengan nilai media sebesar Rp121.000.000.000, nilai maksimum sebesar Rp404.000.000.000, nilai miimum sebesar Rp18.200.000.000, dan standar deviasi sebesar Rp69.800.000.000. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan PAD yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Prrovinsi Aceh selama periode penelitian.

Ketiga, pada variabel anggaran pendidikan (PDDK) nila rata-rata yang dihasilkan sebesar Rp18.300.000.000 dengan nilai mediasi sebesar Rp16.400.000.000, nilai maksimum sebesar Rp89.000.000.000, nilai minimum

sebesar Rp140.000.000.000, dan standar deviasi sebesar 21.100.000.000. hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan alokasi anggaran pendidikan yang cukup bervariasi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Terakhir, variabel Kemiskinan (KMS) memiliki nilai rata-rata sebesar 14,84% dengan nilai median sebesar 14,66%, nilai maksimum sebesar 20,78%, nilai minimum sebesar 5,45%, dan standar deviasi sebesar 3,41%, dengan nilai rata-rata kemiskinan sebesar 14,84% menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh masih tergolong tinggi dan bervariasi antar daerah selama periode penelitian 2019-2025.

C. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan model estimasi yang sesuai untuk digunakan. Terdapat tiga alternative model yang dipertimbangan, yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*, *Common Effect Model (CEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, yang mana pemilihan model yang tepat akan menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik .

1. Pemilihan struktural 1

Pada structural 1 ini, analisis yang dilakukan pada dana Otsus dan PAD terhadap Anggaran pendidikan di Aceh periode 2019-2025 menggunakan rumus $PD = \alpha + \beta_1 DO + \beta_2 PAD + e$

Keterangan:

Z= Anggaran pendidikan (PD)

X1= Dana Otsus (DO)

$X_2 = \text{PAD}$

$\alpha = \text{Konstanta}$

$\beta = \text{Koefisien regresi}$

$e = \text{eror}$

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* untuk melihat nilai probabilitasnya untuk keputusan memilih modelnya. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0.05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, dan jika nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 model yang terpilih adalah *Common Effect Model (CEM)*

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1.659943	(22.136)	0.04216
Cross-section Chi-square	38.294009	22	0.01797

Sumber: Output EViews 14 (2016)

Berdasarkan hasil uji chow, hasil yang diperoleh 0.01797 < 0.05, yang artinya model yang terpilih adalah FEM. Hasil ini menunjukkan bahwa model FEM yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh dana otsus dan PAD terhadap anggaran pendidikan di Provinsi Aceh.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model estimasi yang paling tepat antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Pengujian ini dilakukan apabila hasil uji chow sebelumnya terpilih uji FEM dengan dasar keputusan pengambilannya apabila nilai probabilitas < 0.05, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, sedangkan jika nilainya > 0.05, maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f	Prob
Cros-section random	8.047547	2	0.0179

Sumber: Output EViews (2016)

Berdasarkan hasil Hausman, nilai probabilitas yang didapatkan adalah $0.0179 < 0.05$, maka pada uji ini model yang signifikan untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk memilih model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Adapun dasar pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas kurang dari 0.05 maka model yang terpilih adalah REM sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, maka model yang terpilih adalah CEM.

Tabel 4.5 Hasil Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.756121 (0.3845)	503.9590 (0.0000)	504.7152 (0.0000)
Honda	0.869552 (0.1923)	22.44903 (0.0000)	16.48873 (0.0000)
King-Wu	0.869552 (0.1923)	22.44903 (0.0000)	16.48873 (0.0000)
Standardized Honda	1.160959 (0.1228)	24.84696 (0.0000)	14.26804 (0.0000)
Standardized King-Wu	1.160959 (0.1228)	24.84696 (0.0000)	19.26618 (0.0000)
Gourierourx, et.al	-	-	504.7152 (0.0000)

Sumber: Output EViews 14 (2016)

Berdasarkan hasil uji LM, nilai probabilitas yang dihasilkan adalah $0.3845 > 0.05$, maka model yang terpilih adalah CEM. Hasil uji ini membuktikan bahwa model *Common Effect* lebih cocok digunakan dibandingkan dengan model *Random Effect*.

2. Pemilihan Struktural 2

Pada tahap selanjutnya setelah menyelesaikan struktural 1, dilakukan pemilihan model struktural 2 yaitu, pengujian pengaruh dana otsus, PAD

dan anggaran pendidikan terhadap kemiskinan pada 23 kabupaen/kota di Aceh periode 2019-2025.

$$Y = \alpha + \beta_1 DO + \beta_2 PAD + \beta_3 PD + e$$

Keterangan :

Y= Kemiskinan

X₁= Dana Otsus

X₂= PAD

Z= Anggaran pendidikan

a. Uji Chow

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	117.585951	(22.135)	0.0000
Cross-section Chi-square	483.612981	22	0.0000

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji chow, nilai probabilitas yang dihasilkan adalah $0.000 < 0.05$, yang artinya pada uji ini model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

b. Uji Hausman

**Tabel 4.7
Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f	Prob
Cros-section random	1.446428	3	0.6947

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0.6947 yang artinya angka tersebut lebih besar dari 0.05, maka pada tahap ini model yang terpilih dan yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

c. Uji LM

Tabel 4.8
Hasil LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	420.6906 (0.0000)	0.063801 (0.8006)	420.7544 (0.0000)
Honda	20.51074 (0.0000)	-0.252589 (0.5997)	14.32468 (0.0000)
King-Wu	20.51074 (0.0000)	21.51669 (0.5997)	19.78015 (0.0000)
Standardized Honda	21. 50386 (0.0000)	0.210891 (0.4165)	12.27718 (0.0000)
Standardized King-Wu	21.50386 (0.0000)	0.210891 (0.4165)	7.430521 (0.0000)
Gourierourx, et.al	-	-	465.3048 (0.0000)

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Hasil nilai probabilitas yang diperoleh dari uji LM adalah $0.000 < 0.05$, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Structural 1

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi data panel berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
Jumlah Observasi (<i>Observations</i>)	161
Jarque-Bera	54.26.699
Signifikansi (<i>probability</i>)	0.00000

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera, nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 lebih kecil dari 0.05, sehingga disimpulkan bahwa residual model regresi tidak berdistribusi normal. Namun, kondisi ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang serius dalam penelitian ini. Hal ini dapat bersandar pada pendapat Sihombing

(2021) yang menyatakan bahwa salah satu keuntungan penggunaan data panel adalah dapat menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar serta dapat mengurangi bias dalam pengestimasiannya karena jumlah yang banyak. Pada penelitian ini, jumlah observasi sebanyak 161 data yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019-2025, maka berdasarkan *Central Limit Theorem*, distribusi sampling akan mendekati distribusi normal secara asimtotik apabila jumlah observasi melebihi 30, sehingga asumsi normalitas dapat diabaikan dan analisis regresi data panel tetap dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya (Gujarati and Porter 2009).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix*, yang mana apabila nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0.80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Otsus	PAD
Otsus	1	-0.0169616
PAD	-0.0169616	1

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Dari uji Multikolinearitas, hasil yang didapatkan senilai -0.0169616 yang berada jauh dibawah batas maksimal 0.80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini. Dengan demikian, asumsi bebas

multikolinearitas telah terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual dalam model regresi. Apabila varians residual antar pengamatan tidak sama atau tidak konstan maka disebut heteroskedastisitas, kondisi ini dapat menyebabkan hasil estimasi model regresi menjadi tidak efisien.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistik	(Prob)
C	-1.69E+10	9.95E+09	-1.699326	0.0912
Otsus	0.795697	0.031570	25.20386	0.0000
PAD	-0.023788	0.062355	-0.381491	0.7034

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Park-Test, mendapatkan hasil bahwa variabel dana otsus memiliki nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa dana otsus terindikasi dari heteroskedastisitas. Sedangkan variabel PAD mendapatkan nilai probabilitasnya sebesar $0.7034 > 0.05$, yang artinya variabel ini bebas heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi data panel. Standar umum digunakan untuk mendeteksi gejala ini adalah uji Durbin-Watson.

Tabel 4.12 Hasil Uji Autikolerasi

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
Durbin-Wast on slat	0.598567

Sumber: Ouput EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metedo Durbin-Waston, nilai yang didapataka sebesar 0.598567 yang berada jauh dibawah nilai ideal sebesar 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokolerasi positif dalam model regresi data panel ini.

2. Structural 2

a. Uji Normalitas

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
Jumlah Observasi (<i>Observations</i>)	161
Jarque-Bera	5.623112
Signifikansi (<i>probability</i>)	0.060111

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan uji normalitas dengan metode JB, hasil yang diperoleh sebesar 5.623112 dengan nilai probabilitinya $0.060111 > 0.05$, yang artinya residual pada uji struktual 2 ini telah berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Otsus	PAD	PDDK
Otsus	1.0000	-0.0169616	-0.1131690
PAD	-0.0169616	1.00000	0.28683518
PDDK	-0.1131690	0.28683518	1.00000

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan perolehan hasil uji multikolinearitas semua nilai kolerasi berada < 0.80 , yang artinya secara keseluruhan disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistik	(Prob)
C	2.9227899	0.423888	6.907245	0.0000
Otsus	1.43E-13	4.13E-13	0.345162	0.7304
PAD	-1.99E-12	1.94E-12	-1.029012	0.3051
PDDK	-2.13E-12	2.94E-12	-0.724550	0.4948

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Park Test pada sub 2, hasil yang diperoleh pada variabel otsus memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7304 dan variabel PAD sebesar 0.3051 dan anggaran pendidikan sebesar 0.4948, hasil dari keseluruhan variabel ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan bebas dari heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Tabel 4.16 Hasil Uji Autokolerasi

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
Durbin-Wast on slat	1.351430

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Hasil uji autokorelasi pada persamaan struktural 2 menggunakan metode Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,351430. Nilai ini berada di bawah angka ideal 2, namun masih berada dalam rentang yang dapat ditoleransi yakni antara 1,0 hingga 2,0. Meskipun demikian, nilai yang berada di bawah 1,5 mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif yang lemah dalam model.

Namun demikian, kondisi ini tidak menjadi permasalahan yang serius dalam penelitian ini mengingat data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan dimensi cross-section dari 23 kabupaten/kota dan dimensi time series selama periode 2019–2025.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati dan Porter (2009), pada data panel dengan jumlah observasi yang memadai, gejala autokorelasi ringan tidak secara signifikan mempengaruhi konsistensi dan validitas hasil estimasi, sehingga analisis regresi data panel tetap dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

E. Uji Hipotesis

1. Struktural 1

a. Uji T (Parsial)

Uji T (parsial) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel independen yaitu otsus, PAD, dan Anggaran pendidikan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan pada kabupaten/kota di Aceh periode 2019-2025. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah apabila nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikan 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Coefficient	Std.Er	t-Statistik	Prob
C	8.52E+09	3.65E+09	2.334780	0.0208
Otsus	-0.016568	0.011582	-1.430450	0.1546
PAD	0.086084	0.022876	3.763094	0.0002
Dependent variable: anggaran pendidikan				

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji t, hasil yang diperoleh bahwa variabel otsus memiliki nilai prob. Osus $0.1546 > 0.05$, maka H_a di tolak dan H_0 di terima, yang artinya dana otsus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pddk.

Sedangkan nilai prob. PAD $0.0002 < 0.05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap PADDK.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yaitu otsus dan PAD secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu anggaran pendidikan (PDDK) pada kabupaten/kota di Aceh.

Tabel 4.18 Hasil Uji F

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
F-statistik	8.197193
Prob (F-statistik)	0.000410

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Hasil nilai prob. $0.000410 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a di terima, yang artinya secara bersamaan variabel otsus, pad, dan anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada kabupate/kota aceh periode 2019-2025.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisein derteminasi (R-square) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variebel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dengan keputusan nilai R-square antara 0 hingga 1, yang dimana semakin mendeati angka 1 maka

semakin besar kemampuan variabel independe dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determnasi (R^2)

Indikator	Nilai Statistik
R-square	0.094008
Adjusted R-squared	0.082539

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil diatas, Nilai R-square sebesar 0.094008 atau 9.40% mampu menjelaskan variasi kemiskinan sedangkan 90.60% sisanya dijelaskan oleh model lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Struktural 2

a. Uji T (Parsial)

Tabel 4.20 Hasil Uji T (Parsia)

Variabel	Coefficient	Std.Er	t-Statistik	Prob
C	17.42733	0.577015	30.20257	0.0000
Otsus	8.53E-13	1.81E-12	0.471043	0.0072
PAD	-1.77E-11	3.71E-12	-4.781386	0.0000
PDDK	-1.77E-11	1.24E-11	-1.392636	0.000
Dependent variable: kemiskinan				

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0072 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2019–2025.

Pada variabel PAD dan anggaran pendidikan, hasil yang diperoleh adalah $0.000 > 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan semakin tinggi PAD maka semakin besar dampak pada penurunan kemiskinan daerah. Serta variabel anggaran pendidikan terbukti bahwa secara parsial berpengaruh

negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya semakin tinggi anggaran anggaran pendidikan, maka semakin berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

b. Uji F (Simultan)

Tabel 4.21 Hasil Uji F

Indikator Pengujian	Nilai Statistik
F-statistik	46.63981
Prob (F-statistik)	0.00000

Sumber: Output EViews 14 (2026)

Hasil uji simultan (F), memperoleh nilai F-Statistik sebesar 46.63981 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Secara simultan dibuktikan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota Aceh periode 2019-2025.

c. Uji Koefisien Derteminasi

Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Derteminasi

Indikator	Nilai Statistik
R-square	0.471237
Adjusted R-squared	0.461133

Sumber: Ouput EViews 14 (2026)

Nilai R-square sebesar 0.471237 atau 47.12% yang artinya variabel otsus, PAD, dan anggaran pendidikan mampu menjelaskan variasi kemiskinan di kabupaten/kota Aceh sebesar 40.12% sedangkan sisanya 52.88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

F. Analisis Variabel Mediasi (Uji Sobel)

Uji sibel dilakukan untuk megetahui apakah variabel anggaran pendidikan mampu memediasi atau menjembatani pengaruh dana otsus dan PAD terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota Aceh periode 2019-2025. Variabel *intervevning* atau mediasi dalam penelitian ini digunakan untuk

menjelaskan mekanisme pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel anggaran pendidikan, dengan asumsi bahwa peningkatan dana otsus dan PAD akan mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Dasar pengambilan keputusan dalam uji sobel adalah apabila nilai hitung t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.96 maka variabel anggaran pendidikan dinyatakan mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan.

$$Z = \frac{a \times b}{\sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2}}$$

Keterangan:

a: Jalur variabel independen terhadap variabel mediasi

b: jalur variabel mediasi terhadap variabel dependen

SE: standar eror

Tabel 4.23 Hasil Uji Sobel

Jalur	Koef.a	Koef. b	Sa	Sb	t- hitung	t-tabel	Keputusan
OTSUS→PDK→ KMS	-0.016568	-3.05E- 11	0.0115 82	3.34 E- 12	1.4133	1.96	Tidak Berpengaruh
PAD→PDK→K MS	0.086084	-3.05E- 11	0.0228 76	3.34 E- 12	3.4792	1.96	Berpengaruh

Sumber: Output EViews 14 (2026)

1. Pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemiskinan melalui anggaran pendidikan

Berdasarkan hasil uji Sobel pada jalur OTSUS → PDK → KMS, diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,4133 yang lebih kecil dari

nilai t-tabel sebesar 1,96 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Anggaran pendidikan (PDK) tidak mampu memediasi pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Kemiskinan (KMS) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2025. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh tidak langsung OTSUS terhadap kemiskinan melalui variabel Anggaran pendidikan.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan melalui anggaran pendidikan

Berdasarkan hasil uji Sobel pada jalur $PAD \rightarrow PDK \rightarrow KMS$, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,4792 yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Anggaran pendidikan (PDK) mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan (KMS) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2025. Dengan demikian, terdapat pengaruh tidak langsung PAD terhadap kemiskinan melalui variabel Anggaran pendidikan secara signifikan, yang artinya peningkatan PAD yang diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB V

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian statistic yang dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini akan menyajikan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh temuan penelitian dnegan mengkaitkannya pada landasan teori, kajia empiris terdahulu, serta perspektif islam yang telah dipaparkan sebelumnya.

A. Pengaruh Dana Otsus terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) pada persamaan struktural 2, variabel Dana Otonomi Khusus (Otsus) memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0072 <$ dari tingkat signifikasi 0.05 dengan koefisien positif sebesar $8,53E-13$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga Dana Otsus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2019–2025. Namun demikian, arah koefisien yang bersifat positif mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Otsus justru berkaitan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, bukan penurunannya. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Dana Otsus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ditolak, dan digantikan dengan temuan bahwa Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Temuan ini menjadi salah satu hasil yang paling penting dalam penelitian, karena membuktikan bahwa besarnya Dana Otsus yang diterima

Provinsi Aceh tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Justru sebaliknya, data menunjukkan bahwa peningkatan Dana Otsus justru berjalan beriringan dengan tingginya angka kemiskinan di kabupaten/kota Aceh selama periode 2019–2025. Kondisi ini bukan sekadar kejanggalan angka statistik, melainkan mencerminkan kenyataan di lapangan bahwa pengelolaan Dana Otsus selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara teoritis, hasil ini dapat dipahami melalui kerangka Vicious Circle of Poverty yang dikemukakan Nurkse dalam Kuncoro (1997) yang menjadi landasan teori utama penelitian ini. Dalam kerangka ini ditegaskan bahwa intervensi fiskal dari luar termasuk transfer dana otsus dari pemerintah pusat hanya akan efektif memutus rantai kemiskinan apabila dikelola secara tepat sasaran dan diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung meningkatkan produktivitas masyarakat. Apabila dana tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, maka suntikan modal fiskal yang besar sekalipun tidak akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang baik, bahkan dapat memperburuk kondisi jika disertai dengan inefisiensi birokrasi dan salah sasaran program.

Lebih jauh, Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) memberikan penjelasan tambahan yang relevan. Teori ini menegaskan bahwa penciptaan nilai bagi masyarakat melalui kebijakan fiskal hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRA, hingga masyarakat sipil harus berkoordinasi secara efektif dan bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang diambil.

Hasil penelitian Khalis (2025) mengonfirmasi bahwa meskipun pemerintah Provinsi Aceh dan parlemen daerah memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan Dana Otsus, dominasi keduanya belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi yang memicu kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan (Khalis 2025). Ketika koordinasi antarpemangku kepentingan lemah dan pengawasan tidak berjalan optimal, Dana Otsus yang seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan justru berisiko mengalir ke program-program yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat miskin secara langsung.

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Budiratna dan Qibthiyyah (2020) dalam evaluasinya atas transfer Dana Otsus di Aceh, Papua, dan Papua Barat menemukan bahwa Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh, berbeda dengan Papua Barat yang menunjukkan dampak positif. Ketidakefektifan ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan Dana Otsus di Aceh yang berbeda dari daerah otonomi khusus lainnya. Senada dengan itu, penelitian Kadafi dan Murtala (2020) juga menemukan bahwa secara parsial Dana Otsus tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2010–2017.

Koefisien positif yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan pula dengan temuan Andriyani dan Juliansyah (2018) yang membuktikan bahwa pada tingkat intra wilayah, alokasi Dana Otsus yang tidak berimbang justru

berpotensi meningkatkan kesenjangan antarkabupaten/kota di Aceh. Hal ini menggambarkan bahwa distribusi Dana Otsus yang tidak merata dan tidak tepat sasaran dapat menciptakan konsentrasi pembangunan hanya pada daerah-daerah tertentu, sementara kabupaten/kota lainnya terutama yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir terpencil tetap tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Selain itu, terdapat faktor struktural lain yang turut menjelaskan temuan ini. Sebagaimana diungkap dalam penelitian Bao dkk. (2024) tentang praktik korupsi dalam implementasi otonomi khusus di Papua yang kondisinya memiliki kemiripan kontekstual dengan Aceh pada manfaat Dana Otsus belum berkontribusi positif bagi masyarakat karena tren praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakkan gejala yang mengkhawatirkan. Meskipun konteks geografis dan historisnya berbeda, temuan ini memberikan cerminan yang relevan bahwa lemahnya integritas birokrasi dalam pengelolaan dana otonomi khusus merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dana besar tidak berujung pada penurunan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sekaligus menepis asumsi sederhana bahwa semakin besar Dana Otsus yang dikucurkan, semakin cepat kemiskinan turun. Realitasnya jauh lebih kompleks dari itu. Dalam konteks Aceh periode 2019-2025, hubungan antara Dana Otsus dan kemiskinan justru bersifat positif, yang mengisyaratkan bahwa daerah-daerah dengan alokasi Dana Otsus yang lebih besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang juga lebih tinggi, sebuah

indikasi kuat adanya persoalan serius dalam efektivitas penggunaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus di Provinsi Aceh.

Dengan demikian, temuan pada penelitian ini memberikan pesan kebijakan yang sangat tegas mengenai keberlanjutan program Dana Otsus hingga tahun 2027 harus disertai dengan transformasi mendasar dalam model pengelolaannya. Reformasi tata kelola yang berorientasi pada dampak nyata pengentasan kemiskinan, penguatan mekanisme pengawasan oleh seluruh pemangku kepentingan, serta pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis besaran dana menuju pendekatan berbasis dampak dan akuntabilitas, merupakan prasyarat mutlak agar Dana Otsus dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang memutus rantai kemiskinan di Provinsi Aceh sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA Pasal 183.

Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan yang harus diselesaikan secara kolektif, bukan dibiarkan berlarut-larut. Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan bahwa "sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka". Ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, ayat ini tidak hanya berbicara tentang perubahan individual, tetapi juga perubahan sosial yang bersifat kolektif. Peningkatan yang terjadi secara positif pada Dana Otsus bukan berdampak pada penurunan kemiskinan, melainkan berjalan beriringan dengan tingginya kemiskinan, sehingga memberikan pesan yang sangat kuat dalam perspektif Islam, bahwa perubahan kondisi masyarakat tidak akan terjadi hanya dengan mengalirkan dana dalam jumlah besar, selama

para pemangku kebijakan tidak mengubah cara mereka mengelola amanah tersebut secara fundamental. Pengelolaan Dana Otsus yang tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan tidak akuntabel merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam. Lebih jauh, penggunaan kata "qaum" dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tanggung jawab untuk mengubah kondisi kemiskinan bersifat kolektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, parlemen daerah hingga masyarakat itu sendiri.

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Pada hasil uji H2 pada struktural 2 bahwa PAD memperoleh nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ dengan koefisien negatif $-1,77E-11$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2019–2025, yang berarti semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Temuan ini sejalan dengan teori Rostow (1959) dalam *The Stages of Growth* yang menegaskan bahwa percepatan pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber daya secara mandiri dan menginvestasikannya pada sektor-sektor strategis. PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal daerah memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai program-program pembangunan

yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat miskin, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan layanan publik.

Secara empiris, temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian Ricardo dan Muchlisah (2023) yang membuktikan bahwa PAD merupakan satu-satunya variabel fiskal yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Aceh pada periode 2008-2020. Berbeda dengan Dana Otsus yang bersumber dari transfer pusat, PAD dikelola langsung oleh pemerintah daerah dengan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat setempat, sehingga penggunaannya cenderung lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal yang sesungguhnya.

Temuan ini juga memperkuat argumen dalam kerangka Vicious Circle of Poverty bahwa memutus lingkaran kemiskinan membutuhkan kapasitas fiskal mandiri yang berkelanjutan bukan hanya suntikan dana dari luar yang bersifat sementara. Ketika PAD suatu daerah meningkat, ruang fiskal untuk membiayai program pengentasan kemiskinan semakin terbuka lebar, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lebih nyata dan terukur.

Dalam Islam, upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah sejalan dengan prinsip keadilan distributif ('adl) yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi Islam. Ketika PAD terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini mengonfirmasi bahwa daerah yang mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat akan

menghasilkan penurunan kemiskinan yang nyata. Kondisi ini mencerminkan semangat Islam yang mendorong kemandirian ekonomi umat, bahwa setiap daerah harus berupaya mengoptimalkan potensi yang telah Allah anugerahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah yang amanah dan bertanggung jawab. Lebih jauh, dalam perspektif Islam, PAD yang berhasil dihimpun dari pajak dan retribusi yang halal kemudian digunakan untuk program pengentasan kemiskinan merupakan manifestasi modern dari semangat redistribusi kekayaan yang dalam Islam dikenal melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf, sebagaimana hakikatnya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh sebagian orang harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) pada persamaan struktural 1, variabel Dana Otonomi Khusus (Otsus) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1546 yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan koefisien negatif sebesar -0,016568. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2025. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, pada dasarnya bertentangan dengan amanat Pasal 183 ayat (1) UUPA yang secara eksplisit mewajibkan

minimal 30 persen dari Dana Otsus dialokasikan untuk sektor anggaran pendidikan. Namun demikian, jika dicermati secara lebih mendalam, temuan ini sesungguhnya bukan mengindikasikan bahwa Dana Otsus tidak mengalir ke sektor anggaran pendidikan sama sekali, melainkan lebih mencerminkan bahwa besarnya nominal dana yang tersalurkan tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan anggaran pendidikan yang terukur dan signifikan secara statistik di tingkat kabupaten/kota.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui kerangka Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997) yang digunakan sebagai landasan teori utama dalam penelitian ini. Dalam kerangka ini, Dana Otsus diposisikan sebagai instrumen fiskal eksternal yang seharusnya mampu mengintervensi dan memutus siklus kemiskinan melalui penyuntikan modal ke dalam sistem perekonomian daerah, salah satunya melalui peningkatan investasi di sektor anggaran pendidikan. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa intervensi fiskal melalui Dana Otsus belum berhasil menjalankan fungsi tersebut secara efektif. Kondisi ini mengonfirmasi pandangan Sharp et al. dalam Kuncoro (1997) bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat lemahnya investasi anggaran pendidikan akan berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga siklus kemiskinan terus berputar tanpa henti.

Penjelasan empiris atas tidak signifikannya pengaruh Dana Otsus terhadap anggaran pendidikan dapat ditelusuri dari beberapa sisi. Pertama, penelitian Safrida dkk. (2021) di Kabupaten Aceh Barat menemukan bahwa

sebagian besar dana anggaran pendidikan yang diterima oleh dinas anggaran pendidikan kabupaten terserap untuk membiayai gaji guru, tunjangan pegawai, dan biaya operasional rutin, sehingga dana yang tersisa untuk program peningkatan mutu anggaran pendidikan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aliran Dana Otsus ke sektor anggaran pendidikan lebih banyak bersifat konsumtif daripada investatif, sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada besaran anggaran anggaran pendidikan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat (Sri Hartati 2021).

Kedua, perubahan regulasi tata kelola yang dilakukan berulang kali sehingga menimbulkan ketidak stabilan pada pola distribusi anggaran anggaran pendidikan di kabupaten/kota (Andriyani and Juliansyah 2018). Ketidakkonsistenan regulasi ini menyulitkan perencanaan anggaran anggaran pendidikan secara jangka panjang, sehingga alokasi yang semestinya dapat terprogram dengan baik justru menjadi reaktif dan tidak terstruktur dengan optimal.

Ketiga, dari perspektif Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) dan menjadi salah satu pijakan teoritis dalam penelitian ini, penciptaan nilai bagi masyarakat melalui kebijakan fiskal hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga Majelis Anggaran pendidikan Daerah (MPD) seharusnya ikut berkoordinasi secara efektif dan bertanggung jawab atas dampak kebijakan yang diambil. Lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan penggunaan Dana Otsus untuk anggaran

pendidikan menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa besarnya dana tidak berbanding lurus dengan peningkatan anggaran pendidikan yang bermakna.

Selain itu, penemuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Budirman dan Qibthiyyah (2020), yang menyatakan bahwa Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikator anggaran pendidikan di Aceh, karena penggunaannya masih lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara substansial (Qibthiyyah 2020). Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Kadafi dan Murtala (2020) yang menemukan bahwa secara parsial Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikator pembangunan di Aceh pada periode 2010-2017 (Muhammad Kadafi 2020).

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merah yang jelas, bahwa keberadaan Dana Otsus dalam jumlah besar tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini memberikan pesan yang kritis sekaligus konstruktif, bahwa efektivitas Dana Otsus dalam mendorong peningkatan sektor anggaran pendidikan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, ketepatan sasaran penggunaan, dan kekuatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Tanpa reformasi mendasar pada aspek-aspek tersebut, besarnya nominal Dana Otsus yang dialirkan ke sektor anggaran pendidikan tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dalam perspektif Islam, Dana Otsus pada hakikatnya merupakan sebuah amanah yang wajib dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan transparan sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". Tidak berpengaruhnya Dana Otsus terhadap anggaran pendidikan secara signifikan mengindikasikan bahwa amanah fiskal tersebut belum dijalankan sebagaimana mestinya. Dana yang seharusnya menjadi instrumen untuk mencerdaskan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan justru belum mampu mengalir secara efektif ke sektor anggaran pendidikan yang menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar manusia. Islam memandang anggaran pendidikan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penguasa untuk menciptakan masyarakat yang berilmu dan bermartabat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan hanya melalui proses anggaran pendidikanlah potensi akal, pendengaran, dan penglihatan yang dianugerahkan Allah dapat berkembang secara optimal.

D. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) pada persamaan struktural 1, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ dengan koefisien positif sebesar 0,086084.

Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019-2025. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini diterima.

Makna dari koefisien positif sebesar 0,086084 ini adalah bahwa setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan anggaran pendidikan secara signifikan, dan dapat diartikan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan faktor kunci yang menentukan seberapa besar ruang gerak pemerintah kabupaten/kota dalam berinvestasi pada sektor anggaran pendidikan sebagai modal manusia jangka panjang.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dan saling menguatkan dengan Decentralization Theorem yang dikemukakan oleh Oates (2006) yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Oates menegaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal melalui sumber pendapatan sendiri (own-revenue) akan lebih mampu mengalokasikan pengeluaran publik secara efisien dan responsif sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakatnya, termasuk pada sektor anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama pembangunan manusia. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa argumen teoritis Oates tersebut berlaku nyata dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Aceh, di mana daerah dengan PAD yang lebih tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai layanan anggaran pendidikan bagi masyarakatnya.

Temuan ini juga dapat dibaca dalam kerangka Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997) yang menjadi landasan teori utama penelitian ini, dalam kerangka ini, salah satu akar kemiskinan adalah rendahnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk anggaran pendidikan. Ketika PAD meningkat dan pemerintah daerah mengalokasikannya ke sektor anggaran pendidikan, siklus kemiskinan yang selama ini mengunci masyarakat dapat mulai diinvestasi dari dalam.

Pada konteks ini, PAD yang dialokasikan ke sektor anggaran pendidikan bukan sekedar pengeluaran rutin pemerintah daerah, melainkan wujud nyata dari upaya memutuskan lingkaran setan kemiskinan melalui investasi terencana. Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun oleh sebuah kabupaten/kota, maka semakin besar pula kapasitasnya untuk membiayai anggaran pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transferan dana dari pemerintah pusat.

Secara empiris, temuan hasil penelitian ini dikkonfirmasi oleh penelitian Arisapen dan Rahmi (2021) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh, di mana anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran IPM tersebut (Arisapen et al. 2020). Dengan kesimpulan bahwa, semakin besar kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan aslinya, semakin besar pula kapasitas pemerintah

daerah dalam membiayai layanan publik yang mendukung peningkatan kualitas masyarakat, khususnya melalui jalur anggaran pendidikan.

Selain itu, hasil lainnya seperti temuan Machfud dkk (2020), juga memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Aceh, yang pada gilirannya membuka ruang fiskal lebih luas untuk belanja pada sektor-sektor strategis termasuk anggaran pendidikan (Machfud, Asnawi 2020) .

Jika ditinjau lebih jauh, perbandingan hasil pengujian otsus yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendidikan, berbanding balik dengan temuan hasil uji terhadap PAD, yang merupakan cerminan kemandirian fiskal daerah justru terbuti lebih efektif dalam mendorong peningkatan anggaran anggaran pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa dana yang dikelola dengan tingkat akuntabilitas dan responsivitas yang baik dan mengutamakan kebutuhan lokal dan masyarakatnya lebih berdampak dan terarah serta proporsional terhadap prioritas pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Kondisi ini sekaligus memperkuat argumen teoretis dalam Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997) bahwa upaya memutus siklus kemiskinan membutuhkan tidak hanya suntikan modal dari luar, tetapi juga penguatan kapasitas fiskal mandiri daerah yang mampu secara berkelanjutan membiayai investasi pada sektor anggaran pendidikan sebagai salah satu pilar utama pengembangan sumber daya manusia. Ketika PAD meningkat dan

secara konsisten diarahkan pada belanja anggaran pendidikan, maka rantai kemiskinan struktural yang selama ini melilit masyarakat Aceh berpeluang untuk diputus secara bertahap melalui peningkatan kualitas dan akses anggaran pendidikan yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

Dengan demikian, penemuan ini memberikan sinyal yang sangat jelas bagi pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh, bahwa penguatan dan optimalisasi PAD melalui perluasan pajak daerah, peningkatan retribusi, dan pengelolaan BUMD yang lebih profesional bukan hanya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga merupakan langkah strategis yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan anggaran anggaran pendidikan, dan pada akhirnya berpotensi mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dari sudut pandang Islam, PAD sebagai sumber pendapatan mandiri daerah diperbolehkan dan didorong selama pengelolaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat, bersumber dari hal-hal yang halal, tidak menzalimi masyarakat, serta dikelola secara adil dan transparan sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori proposal ini. Terbuktinya pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap anggaran anggaran pendidikan mencerminkan bahwa ketika suatu daerah mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan amanah, maka hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan layanan anggaran pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, bahwa setiap kebijakan fiskal pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan seluruh lapisan

masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ketika PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dikelola secara amanah dan diarahkan untuk membiayai anggaran pendidikan, maka hal ini merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban.

E. Pengaruh Anggaran pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa variabel anggaran pendidikan memperoleh nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ dengan koefisien negatif $-1,77E-11$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh, yang berarti semakin besar anggaran pendidikan yang dialokasikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Temuan ini merupakan konfirmasi paling kuat dari seluruh pengujian dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi inti dari argumen utama penelitian bahwa anggaran pendidikan adalah jalur transmisi yang paling efektif dalam menghubungkan kebijakan fiskal dengan pengentasan kemiskinan. Hasil ini sejalan langsung dengan kerangka Vicious Circle of Poverty (Nukrese dalam Kuncoro, 1997) yang menjadi landasan teori utama dalam penelitian ini. Pada kerangka ini, salah satu mata rantai kemiskinan yang paling krusial adalah rendahnya investasi pada anggaran pendidikan yang mengakibatkan rendahnya produktifitas dan pendapatan masyarakat. Ketika anggaran pendidikan

ditingkatkan secara signifikan, maka mata rantai kemiskinan mulai terputus, logikanya: kualitas sumber daya manusia meningkat, produktifitas bertambah, akses terhadap pekerjaan formal semakin terbuka, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat sehingga masyarakat mampu keluar dari jerat kemiskinan.

Dalam perspektif Endogenous Growth Theory (Romer, 1989), pendidikan bukan sekadar output pembangunan tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika anggaran pendidikan meningkat dan digunakan secara efektif, kualitas sumber daya manusia meningkat, produktivitas tenaga kerja bertambah, akses terhadap pekerjaan formal semakin terbuka, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat sehingga mereka mampu mengubah siklus kehidupannya.

Secara empiris, temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian Rika Pertiwi dkk. (2025) yang membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Senada dengan itu, Natasya dkk (2025) juga membuktikan bahwa alokasi anggaran pendidikan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh pada periode 2013–2024. Temuan-temuan ini secara kolektif menegaskan bahwa anggaran pendidikan merupakan instrument intervensi fiskal yang paling efektif dan kunci utama yang selama ini kurang dioptimalkan dalam kebijakan fiskal Aceh, sekaligus membuktikan bahwa jalan keluar dari lingkaran setan kemiskinan dimulai dari investasi nyata pada sektor pendidikan dalam bentuk anggaran.

Temuan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan memiliki resonansi yang sangat kuat dalam perspektif Islam. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu kewajiban paling mendasar bagi setiap manusia sebagaimana kalimat "tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat" dan Islam juga memandangnya sebagai jalan utama menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Allah SWT dalam surat An-Nahl menegaskan bahwa manusia dianugerahi pendengaran, penglihatan, dan hati agar dapat belajar dan berkembang. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan merupakan investasi pada kualitas manusia sebagai khalifah di bumi yang harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prinsip Islam tersebut bukan sekadar nilai normatif, melainkan juga terbukti secara empiris: daerah yang lebih banyak berinvestasi pada pendidikan dalam bentuk anggaran akan menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, lebih mandiri secara ekonomi, dan lebih mampu keluar dari jerat kemiskinan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa kemiskinan dalam Islam bukan sesuatu yang dinormalisasi, melainkan harus diperangi melalui upaya kolektif dan juga pendidikan adalah salah satu senjata paling ampuh dalam perjuangan tersebut.

F. Peran Anggaran pendidikan sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan Dana Otsus terhadap Kemiskinan

Hasil uji Sobel pada jalur OTSUS → PDK → KMS menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,4133 yang lebih kecil dari t-tabel 1,96 pada $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya anggaran pendidikan tidak

mampu memediasi pengaruh Dana Otsus terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Hasil ini sebenarnya dapat diprediksi dari temuan sebelumnya. Logika mediasi mensyaratkan dua kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan: pertama, variabel independen harus berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi, dan kedua, variabel mediasi harus berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, syarat pertama tidak terpenuhi karena Dana Otsus terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendidikan (pada hasil H1). Akibatnya, jalur mediasi dari Dana Otsus melalui anggaran pendidikan menuju kemiskinan menjadi terputus secara statistik.

Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi kerangka Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997) bahwa Intervensi fiskal dari luar seperti dana Otsus, hanya akan efektif memutus rantai kemiskinan apabila benar-benar mengalir ke sektor yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, termasuk anggaran pendidikan. Ketika dana Otsus secara signifikan tidak mendorong peningkatan anggaran pendidikan, maka jalur transmisi menuju penurunan kemiskinan melalui pendidikan menjadi terputus.

Sejalan dengan argumen dari Sharp et al. dalam Kuncoro (1997), rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat lemahnya investasi pendidikan akan berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan, sehingga lingkaran kemiskinan terus berputar tanpa ada titik jeda yang efektif.

Implikasi dari temuan ini sangat jelas: selama penggunaan Dana Otsus di sektor anggaran pendidikan belum dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan

berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata, maka harapan untuk menjadikan Dana Otsus sebagai pengungkit utama pengentasan kemiskinan melalui jalur anggaran pendidikan akan sulit terwujud.

Tidak terbuktinya peran anggaran pendidikan sebagai mediator antara Dana Otsus dan kemiskinan memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam perspektif Islam. Dalam Islam, niat baik harus diiringi dengan kinerja yang jujur dan benar, karena jika tidak dibarengi dengan kerja keras, pengelolaan yang jujur, dan pengawasan yang sungguh-sungguh, maka niat baik tersebut tidak akan menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, perubahan kondisi suatu kaum tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata dari dalam. Dana Otsus yang mengalir ke sektor anggaran pendidikan tetapi tidak dikelola secara efektif dan tepat sasaran tidak akan mampu mengubah kondisi kemiskinan masyarakat Aceh. Kondisi ini mengingatkan bahwa amanah pengelolaan dana publik dalam Islam harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan setiap pejabat yang mengelola Dana Otsus untuk anggaran pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

G. Peran Anggaran pendidikan sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan PAD terhadap Kemiskinan

Hasil uji Sobel pada jalur PAD → PDK → KMS menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,4792 yang lebih besar dari t-tabel 1,96 pada $\alpha = 0,05$, sehingga

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya anggaran pendidikan mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh secara signifikan. Temuan ini merupakan salah satu kontribusi terpenting dari penelitian ini karena membuktikan secara empiris bahwa anggaran pendidikan benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kemandirian fiskal daerah dengan pengentasan kemiskinan.

Mekanisme transmisinya dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: ketika PAD suatu kabupaten/kota meningkat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Peningkatan pendidikan ini kemudian mendorong perbaikan kualitas dan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik selanjutnya memiliki keterampilan dan produktivitas lebih tinggi, sehingga lebih mudah mengakses pekerjaan formal dengan penghasilan layak, dan pada akhirnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut pun menurun.

Siklus virtuous ini sepenuhnya sejalan dengan kerangka Vicious Circle of Poverty (Nurkse dalam Kuncoro, 1997) yang menjadi landasan teori utama penelitian ini. Temuan ini membuktikan bahwa PAD yang diinvestasikan melalui anggaran pendidikan mampu memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini melilit masyarakat Aceh. Ketika ruang fiskal daerah semakin besar melalui peningkatan PAD, dan dana tersebut secara konsisten diarahkan pada belanja pendidikan, maka siklus lingkaran setan kemiskinan yang selama ini berjalan karena rendahnya modal dan produktivitas mulai dapat diintervensi

secara nyata. Mekanisme ini merupakan transmisi yang paling konsisten dengan teori Nurkse, yaitu: investasi modal yang paling tepat sasaran pada sektor pendidikan menjadi pengungkit yang efektif untuk memutuskan siklus kemiskinan dari dalam.

Secara empiris, temuan ini selaras dengan penelitian Roza dkk. (2026) yang membuktikan bahwa pendidikan efektif dalam memutus siklus kemiskinan struktural melalui perubahan perilaku dari konsumtif menjadi produktif. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Soufyan dkk. (2025) yang menegaskan bahwa investasi pada dimensi pembangunan manusia, terutama pendidikan, merupakan instrumen yang jauh lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, perbedaan yang mencolok antara Dana Otsus dan PAD dalam kemampuannya dimediasi oleh anggaran pendidikan memberikan pelajaran kebijakan yang sangat berharga. PAD yang dikelola langsung oleh daerah dengan akuntabilitas yang lebih tinggi dan responsivitas yang lebih kuat terhadap kebutuhan lokal mampu mengalir secara lebih efektif ke sektor anggaran pendidikan dan menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan. Sementara Dana Otsus yang bersifat transfer dari pusat, tanpa disertai tata kelola yang baik, gagal menjalankan fungsi yang sama.

Dengan demikian, temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan yang sangat konkret untuk memaksimalkan dampak kebijakan fiskal terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah kabupaten/kota perlu secara

serius memperkuat basis PAD-nya sekaligus memastikan bahwa sebagian besar dari PAD yang berhasil dihimpun tersebut dialokasikan secara strategis dan efektif untuk sektor anggaran pendidikan. Hanya melalui sinergi antara kemandirian fiskal dan investasi anggaran pendidikan yang terarah, cita-cita pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh dapat terwujud secara berkelanjutan.

Terbuktinya peran anggaran pendidikan sebagai mediator yang signifikan antara PAD dan kemiskinan merupakan temuan yang memiliki makna mendalam dalam perspektif Islam. Siklus virtuous yang terbentuk pada PAD yang meningkat, anggaran pendidikan meningkat, kualitas SDM meningkat, kemiskinan menurun, merupakan perwujudan nyata dari prinsip Islam bahwa perubahan kondisi masyarakat harus dimulai dari perubahan dalam diri mereka sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ketika pemerintah daerah menggunakan PAD secara amanah untuk membiayai anggaran pendidikan yang berkualitas, dan masyarakat memanfaatkan kesempatan anggaran pendidikan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kemandiriannya, maka lingkaran setan kemiskinan yang digambarkan dalam Vicious Circle of Poverty perlahan dapat diputus. Dalam perspektif Islam, inilah hakikat dari tanggung jawab kolektif seperti kata qaum yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd: perubahan menuju kesejahteraan hanya akan terwujud ketika seluruh elemen, mulai dari pemerintah yang mengelola PAD secara amanah, hingga masyarakat yang memanfaatkan anggaran pendidikan dengan sebaik-baiknya, bergerak bersama dalam satu arah yang sama. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam Islam,

kemiskinan bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan investasi anggaran pendidikan yang sungguh-sungguh berorientasi pada peningkatan kualitas manusia sebagai khalifah di bumi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh dengan anggaran pendidikan sebagai variabel mediasi pada 23 kabupaten/kota periode 2019–2025. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi data panel dan uji Sobel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh, namun arah pengaruhnya bersifat positif yang berarti peningkatan Dana Otsus justru beriringan dengan peningkatan kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana Otsus yang tidak tepat sasaran, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, dan ketimpangan distribusi antarkabupaten/kota menjadi faktor utama yang menyebabkan Dana Otsus belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan instrumen yang lebih efektif dibandingkan Dana Otsus dalam mendorong penurunan kemiskinan, karena

pengelolaannya lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

3. Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Meskipun UUPA Pasal 183 mengamanatkan minimal 30 persen Dana Otsus untuk sektor anggaran pendidikan, besarnya dana yang dialirkan tidak secara statistik mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang bermakna di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh lemahnya tata kelola, tingginya belanja pegawai yang menyerap sebagian besar anggaran, serta ketidakstabilan regulasi pengelolaan Dana Otsus yang berulang kali berubah.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Daerah yang memiliki kemandirian fiskal lebih tinggi terbukti mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor anggaran pendidikan. Ini membuktikan bahwa sumber pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh daerah lebih efektif dalam mendorong investasi anggaran pendidikan dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
5. Anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Semakin besar anggaran pendidikan yang dialokasikan, semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah. Temuan ini menegaskan bahwa investasi anggaran pendidikan merupakan instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan

struktural di Aceh, sesuai dengan landasan Human Capital Theory yang menjadi pijakan utama penelitian ini.

6. Anggaran pendidikan tidak mampu memediasi pengaruh Dana Otsus terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Jalur transmisi dari Dana Otsus menuju kemiskinan melalui anggaran pendidikan terputus secara statistik karena Dana Otsus sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendidikan. Artinya, selama Dana Otsus belum mampu secara efektif mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang berkualitas, maka harapan untuk menjadikannya sebagai pengungkit pengentasan kemiskinan melalui jalur anggaran pendidikan tidak akan terwujud.
7. Anggaran pendidikan mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh secara signifikan. Ini merupakan temuan terpenting dalam penelitian ini yang membuktikan bahwa PAD yang diinvestasikan melalui sektor anggaran pendidikan terbukti mampu menurunkan kemiskinan secara tidak langsung. Siklus virtuous terbentuk: PAD meningkat → anggaran pendidikan meningkat → kualitas SDM meningkat → kemiskinan menurun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. bagi Pemerintah Provinsi Aceh, perlu dilakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola Dana Otsus, khususnya pada sektor pendidikan. Alokasi minimal 30 persen Dana Otsus untuk anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan pada program yang bersifat investatif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, bukan sekadar membiayai belanja pegawai dan operasional rutin. Penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Majelis pendidikan Daerah (MPD) dan masyarakat sipil, perlu segera diperkuat agar setiap rupiah Dana Otsus yang dialirkan ke sektor pendidikan benar-benar menghasilkan dampak yang terukur dan dirasakan oleh masyarakat.
2. bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, mengingat PAD terbukti lebih efektif dibandingkan Dana Otsus dalam mendorong peningkatan anggaran pendidikan dan penurunan kemiskinan, maka upaya optimalisasi PAD melalui perluasan basis pajak daerah, peningkatan retribusi, dan pengelolaan BUMD yang lebih profesional perlu menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan bahwa sebagian besar PAD yang berhasil dihimpun diarahkan secara strategis pada sektor anggaran pendidikan, khususnya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini tertinggal.
3. Bagi Pemerintah Pusat, mengingat masa berlaku Dana Otsus Aceh akan berakhir pada tahun 2027, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Dana Otsus selama dua dekade terakhir. Hasil evaluasi ini

hendaknya menjadi dasar perumusan kebijakan fiskal pengganti yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan di Aceh. Jika kebijakan Dana Otsus diperpanjang, maka mekanisme penyalurannya perlu dirancang ulang agar lebih berbasis kinerja dan dampak nyata, bukan sekadar berbasis besaran alokasi

4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi peluang pengembangan di masa mendatang. Pertama, periode penelitian yang terbatas pada 2019-2025 belum mencakup keseluruhan era Dana Otsus yang dimulai sejak 2008, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan periode penelitian agar gambaran yang diperoleh lebih komprehensif. Kedua, indikator pendidikan dalam penelitian ini hanya menggunakan besaran anggaran pendidikan, kepada peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan indikator yang lebih kaya seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau Indeks pendidikan sebagai proksi yang lebih mencerminkan kualitas pendidikan secara substantif. Ketiga, mengingat adanya masalah autokorelasi pada struktural 1 dan heteroskedastisitas pada variabel Dana Otsus, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik estimasi yang lebih robust seperti GLS (Generalized Least Squares) atau metode HAC (Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent) untuk menghasilkan estimasi yang lebih andal. Keempat, penelitian lanjutan dapat memperluas model dengan memasukkan variabel moderasi seperti kualitas

tata kelola daerah atau tingkat korupsi, untuk menangkap faktor-faktor kelembagaan yang turut menentukan efektivitas kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- (BAPPEDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2022. “Otonomi Khusus Aceh Dan Kemiskinan (Sebab Dan Upaya).”
- A, Salsabila Maisah. 2023. “Definisi Variabel Mediasi Dalam Penelitian Kuantitatif.” 2023. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/variabel-mediiasi-dalam-penelitian/>.
- Abdul Latif, Jean Elikal Marna. 2026. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Khusus Fisik Dan” 5 (2): 1473–84.
- Aceh, Humas. 2015. “MPD Adalah Pusat Penelitian Dan Pengembangan pendidikan Aceh.” Biro Administrasi Pimpinan SETDA ACEH. 2015. <https://humas.acehprov.go.id/mpd-adalah-pusat-penelitian-dan-pengembangan-pendidikan-aceh/>.
- Aceh, Pemerintah Provinsi. 2023. “Tentang Kami Sekilas Aceh.” I-KHub. 2023. <https://ikhub.id/peta/45350344>.
- Afandi, Muhamad. 2024. “pendidikan Dalam Perspektif Islam,” 111–28.
- Ahmad Choiri, Wahyu Wibowo, Isna Arifa, Aminuddin. 2025. “Dampak Pengangguran Dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, Dan Politik Di Indonesia” 4 (3): 947–55.
- Akuntabilitas, Badan, Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat, and Republik Indonesia. 2020. “Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.”
- Alaydrus, Hadijah. 2023. “Kategori Miskin Di RI : Pengeluaran Di Bawah Rp 17.851/Hari.”CNBC Indonesia. 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119080431-4-406648/kategori-miskin-di-ri-pengeluaran-di-bawah-rp-17851---hari>.
- Along Timang Tandiboyong, Xaveria Indri Prasasyaningsi. 2024. “Dampak Penerimaan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua” 2:1502–13.
- Amalia, Finka, and Zulfa Emalia. 2022. “Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam Dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera” 01 (5): 737–50.
- Ambarwati, Dina, Fakultas Ekonomi, Islam Universitas, Islam Negeri, Fakultas Ekonomi, Islam Universitas, and Islam Negeri. 2024. “Faktor Pemicu Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Indonesia” 2 (1).
- Ananto, Eko Adityo, Teuku Surya Darma, Nur Muhammad Ridwan, and

- Arfan Rizald. 2018. "Satu Dasawarsa Otsus Aceh Tahun 2008 s.d 2018."
- Andriyani, Devi, and Hijri Juliansyah. 2018. "Analisis Disparitas Wilayah Di Provinsi Aceh : Telaah Pada Dana Otonomi Khusus" 01 (2003): 100–107.
- Anwar, Ahmad Faridz. 2023. "Landasan Konseptual Otonomi Daerah Dalam Perspektif Islam" 8 (2): 62–76.
- Arfiani, Devi. 2009. *Berantas Kemiskinan*. Edited by Mustain.
- Arispen, Arisa, Dewi Rahmi, Prodi Ilmu, Fakultas Ekonomi, and Islam Bandung. 2020. "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020," 75–81.
- Arsani, Ade Marsinta, Bugi Ario, and Al Fitra Ramadhan. 2020. "Impact of Education on Poverty and Health : Evidence from Indonesia" 9 (6).
- Balqis, Meutia, Nurlathifatul Qalbiyah Sinaga, and Nurlaila Hanum. 2025. "Pengaruh pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh."
- Bappeda Aceh. 2015. "Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh." *Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Kabupetn/Kota*.
- Becker, Gary S. 1975. "Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis , with Special Reference to Education."
- Boky, Novita Anastasya. 2023. "Penagruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" 2 (3): 658–64.
- Brezeanu, Petre. 2013. "Theoretical Aspects Regarding Public Expenditures" 13 (1): 211–20.
- Cahyono, Heru. 2018a. *BAB III "Politik Pengelolaan Dana Otsus Di Aceh."* Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- . 2018b. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa (BAB III, Politik Pengelolaan Dana Otsus Di Aceh)*. Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro.
- Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz dan Heru. 2018. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro.
- Cahyoo, Heru. 2018. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cariustadz.id. 2026. "Surah Ar-Ra'd Ayat 11 Dan Rahasia Resiliensi." Yayasan-Dakwah-Lentera-Indonesia.-2026.

- <https://cariustadz.id/artikel/detail/surah-ar-rad-ayat-11-dan-rahasia-resiliensi>.
- Center, Binus University Binus Entrepreneurship. n.d. “Teori Pertumbuhan.” [https://binus.ac.id/entrepreneur/2023/04/18/teori-pertumbuhan/#:~:text=Teori Pertumbuhan Endogen: Teori ini,pengembangan%2C pendidikan%2C dan inovasi](https://binus.ac.id/entrepreneur/2023/04/18/teori-pertumbuhan/#:~:text=Teori%20Pertumbuhan%20Endogen%20Teori%20ini,pengembangan%20pendidikan%20dan%20inovasi).
- Dara Angreka Soufyan, Rimal Mahdani, Donni Rozika, Didi Muhyiddin, and Cut Widy Aulia Putri Mardiana. 2025. “Aceh Dan Tantangan Kemiskinan;” 15–31.
- Dermawan, Wildan Dwi. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat),” 153–56.
- Dian Maulana Rizki, Zikriatul Ulya, Tajul Ula. 2026. “Analysis Of The Impact Of The Level Of Poverty In The Special Autonomy Era - Aceh: Looking At The Degree Of Independence And Fiscal Decentralization Policy Of The Region” 10 (1).
- Dinsos,-Admin.-n.d.-“Kemiskinan.” [https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinaan-82#:~:text=Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan,dan ekonomi di seluruh dunia](https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinaan-82#:~:text=Kemiskinan%20dapat%20disebabkan%20oleh%20kelangkaan,dan%20ekonomi%20di%20seluruh%20dunia).
- DJPb, Redaksi. 2021. “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana,-Dan-Prioritasnya.”-2021. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Prioritas Dana Desa,Anak Usia Dini \(PAUD\)](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Prioritas%20Dana%20Desa,Anak%20Usia%20Dini%20(PAUD)).
- E.R. Eide, M.H. Showalter. 2010. “Human Capital Theory.” 2010. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-capital-theory?utm_source=chatgpt.com.
- Ethingto, Lee M Wolfe ad Corinna A. 1985. “Seine: Standard Errors Of Indirect Effects.”
- Fadhlurrahman, Irfan. 2025. “Proporsi Tingkat pendidikan Penduduk Kab. Aceh-Jaya-(Desember-2024).”-Databoks.-2025. [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9573b83f5e3e3f4/76-penduduk-aceh-jaya-beranggara pendidikan-tinggi-pada-akhir-2024#:~:text=Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Aceh,* Tidak/Belum Sekolah: 21%2C41 ribu jiwa \(21%2C12%25\)](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9573b83f5e3e3f4/76-penduduk-aceh-jaya-beranggara pendidikan-tinggi-pada-akhir-2024#:~:text=Berikut%20ini%20rincian%20jumlah%20penduduk%20Kabupaten%20Aceh,%20Tidak%20Belum%20Sekolah%2021%2C41%20ribu%20jiwa%20(21%2C12%25)).
- Fernando, Eric, and M Afdal Samsuddin. 2025. “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2024” 02:54–59.

- Fiskal, Desentralisasi, D A N Pertumbuhan, Serta Kaitannya, Dengan Otonomi, A Rustan, Pkpa I I I Lembaga, and Administrasi Negara. n.d. "Relation With Regional Autonomy" 9 (3): 284–304.
- Freeman, R Edward, and Strategic Management. 1984. *Stakeholder Theory*.
- Gede, Luh, and Sri Artini. 2017. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Email : Tarastya@gmail.Com Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Da" 6 (5): 2360–87.
- Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*.
- Hari Sugiharto Setyaedhi, Rusijono, Ardianik. n.d. "Uji Asumsi Klasik Statistik-Sugiyono." <https://fullpdfword.com/reviews/u4AB3C/245592/4968440-uji-asmusi-klasik-statistik-sugiyono>.
- Hartika, Ika. 2024. "Analisis Kemiskinan Di Provinsi Aceh" 2 (1): 14–29.
- Hertiana, Eriyen. 2014. "Pengaruh Konflik GAM-RI Di Bidang Politik Dan Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat Aceh Tahn 1976-2012" 1953:44–60.
- Humaskemenko Polhukam RI. 2025. "Kemenko Polkam Dorong Reformasi Tata Kelola Dana Otsus Dan Pembangunan Infrastruktur Di Aceh." 2025. <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-dorong-reformasi-tata-kelola-dana-otsus-dan-pembangunan-infrastruktur-di-aceh/>.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. 2024. "Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0," no. 978-623-120-976–4.
- Ikbāl Ramzani, Muhammad Yasir Yusuf, Hafas Furqani. 2020. "Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)."
- Iqbal, muhammad taufik. 2023. "Memahami R Square (Koefisien Determinasi) Dalam Penelitian Ilmiah." Binus University. 2023. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-r-square-koefisien-determinasi-dalam-penelitian-ilmiah/>.
- Itang. 2014. "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan," 1–30.
- Jaenudin, M, and Ali Hamdan. 2022. "The Impact Assessment of Zakat , Infaq , Shadaqah on Spiritual and Material Poverty in Beneficiaries of LMI Zakat Institution : The CIBEST Approach Penilaian Dampak Zakat , Infak , Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima-Manfaat-Laznas"-9-(3):-362–78. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>.
- Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2022. "Perkebunan Masih Jadi

- Andalan.” Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik. 2022. <https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/10/237/perkebunan-masih-jadi-andalan.html>.
- Kadji, Yulianto. 2004. “Kemiskinan Dan Konsep Teorinya.” “Kementrian Keuangan, “Pendapatan Daerah.” n.d.
- Khairiroh, Najwa Elok. 2025. “Kemiskinan Di Indonesia : Analisis Penyebab , Dampak , Dan Solusi Kebijakan” 3 (Sholch 2010): 642–51.
- Khalis, Akhsanul. 2025. “Analisis Pemangku Kepentingan Dana Otonomi Khusus Aceh Dengan Pendekatan Mendelow ’ s Matrix,” 235–48.
- Khasim, H. 2026. “BPS Tetapkan Garis Kemiskinan Masyarakat Berada Dibawah Rp3,05 Juta per Rumah Tangga per Bulan.” Cara Pandang by-Lintang-Kreasindo-Media.-2026. <https://carapandang.com/news/read/bps-tetapkan-garis-kemiskinan-masyarakat-berada-dibawah-rp305-juta-per-rumah-tangga-per-bulan>.
- Ladayani, Cut Chusnul Agmeliani dan Wildia Ulfita. 2023. “Realitas pendidikan Aceh: Tertutup Dan Kalah Saing, Apa Solusinya?” Komunikasi Dan Penyiar Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2023. <https://kpi.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/realitas-pendidikan-aceh-tertutup-dan-kalah-saing-apa-solusinya>.
- Lestari, Putri Indah, and Bernadette Robiani. 2023. “Kemiskinan Ekstrem , Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 11 (2): 1739–52.
- Luqman Hakim. 2024. “Pengertian Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli.”-Deepublishstore.-2024. https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/#2_Ridwan_2010_51.
- Machfud, Asnawi, Naz’aini. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh” 5 (1): 14–31.
- Maharani, Chika, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, and Arif Fadilla. 2024. “Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas pendidikan Anak Di Indonesia : Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif” 1 (3): 1–10.
- Malinda Sari, Ichsan. 2020. “Analysis Of General Allocation Fund Efficiency and Regional Original Income On The Financial Performance Of City Governments In Province Aceh” 03 (April): 27–36.
- Maulana, Razy Ridha. 2023. *Provinsi Aceh Dalam Angka*. BPS Provinsi Aceh BPS-Statistics of Aceh Province.

- Meysinta, Desti Putri, and Zahriatul Aini. 2025. "Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan" 9 (3): 817–31.
- Muhammad Kadafi, Murtala. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Peroide 2010-2017" 3:23–31.
- Muhammad Razi, Muhammad Jaiz. 2025. "Desentralisasi Fiskal Di Aceh: Tinjauan Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah" 2 (1): 93–103.
- Munawaroh, Binti, Ajeng Wahyuni, Agyl Henggar Pradana, U I N Kiai, Ageng Muhammad, Besari Ponorogo, U I N Kiai, et al. 2025. "Pengaruh Jumlah Penduduk , PDRB Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur" 5 (1): 111–24. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i1.4570>.
- Munawwarah, Syifa. 2020. "Kepastian Hukum Kewenangan Pengelolaan Sektor Wisata Aceh Singkil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Dinas Pariwisata , Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Dan BKSDAE)" 1 (2): 90–106.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah" 2 (1).
- Natsir, Stid Muhammad, Indonesia Mujiadi, and Stiu Darul Hikmah. 2024. "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam" 7 (2): 4–12.
- Nico. 2016. "Resume Kelas Metpen (DOV Dan Responden, Fokus Dan Informan)." SiteOrigin. 2016. <https://fia.ub.ac.id/lama/rsc/de/kelas-metpen/resume-kelas-metpen-dov-dan-responden-fokus-dan-informan.html>.
- Nora, Hestya Fitri, Ibnu Hajar, Sonny Muhammad, Ikhsan Mangkuwinata, Administrasi pendidikan, and Universitas Al Muslim. 2025. "Perencanaan Pembiayaan pendidikan Pada Satuan pendidikan SMP Di Kabupaten Aceh Tengah" 9:12168–72.
- Nurjannah, Rona Susan. 2025. "Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita Dan Realita Bergantung Pada Transfer Pusat Artikel Ini Telah Tayang Di Situs Media Keuangan | MK+ Dengan Judul 'Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita Dan Realita Bergantung Pada Transfer Pusat - Media-Kuangan'-Lihat-Se."-2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>.
- Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro. 2018. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*.

- Oates, Wallace E. 2006. "On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization."
- Pemda.-2024.-"Portal-Data."-2024.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2024&provinsi=01&pemda=->.
- "Pendapatan Asli Daerah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_asli_daerah.
- Perbendaharaan, Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal. 2023. "Jenis Pengukuran-Kemiskinan-Di-Indonesia."-2023.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3155-kemiskinan-makro-dan-kemiskinan-mikro.html>.
- Pertiwi, Rika, Asnidar Asnidar, Nurlaila Hanum, Puti Andiny, and Safuridar Safuridar. 2025. "Pengaruh Tingkat pendidikan , Pertumbuhan Ekonomi , Dan Kepadatan," no. 2016.
- Putra, Aditya Herlambang. 2024. "Menengok Kriteria Orang Miskin Menurut BPS." Tempo. 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/menengok-kriteria-orang-miskin-menurut-bps-43769>.
- Qibthiyyah, Hasta Budiratna dan Riatu M. 2020. "Evaluasi Atas Transfere Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat (2020)" 1:402–14.
- Ricardo, Rico, and Ayu Muchlisah. 2023. "Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh" 5:1338–43.
<https://doi.org/10.37034/infv.v5i4.687>.
- Rihadah, Siti Azizah, Universitas Sumatera Utara, Dwi Widayati, Universitas Sumatera Utara, Nurhayati Harahap, and Universitas Sumatera Utara. 2025. "Bentuk-Bentuk Kemiskinan Dalam Novel Dompot Ayah Sepatu Ibu Karya Js . Khairen : " 3 (5): 283–96.
- Rihadatul Aisi, Elyanti Rosmanidar. 2026. "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Keuangan Publik Islam Di Bakeuda Kabupaten Tebo" 3 (1): 214–26.
- Romer, Paul M, Gary Becker, Karl Shell, Robert Lucas, Gene Grossman, and Elhanan Helpin. 1989. "Paul M.," no. 3210.
- Rostow, Author W W. 1959. "The Stages of Economic Growth Economi-C History Review" 12 (1): 1–16.
- Roza, Silvia, Sri Hidayati, Herza Netty, and Wawan Erizona. 2026. "TOFEDU : The Future of Education Journal The Effectiveness of Economic Education in Reducing Extreme Poverty in Indonesia" 5 (1): 124–31.

- Safrida,-Nila.-2021.-“Implementasi-Kebijakan-Pemerintah-Dalam Meningkatkan- Kualitas- pendidikan Di Aceh Barat Implementation of Government Policies in Improving the Quality of Education in West Aceh” 9 (2): 71–80.
- Safrina. 2024. “Dana Otsus Aceh Segera Berakhir, Pemda Minta BMA Kembangkan-Wakaf-Produktif.”-2024.
<https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/dana-otsus-aceh-segera-berakhir-pemda-minta-bma-kembangkan-wakaf-produktif>.
- Safrinja, Eva, Puti Andiny, Martahadi Mardhani, and Safuridar Safuridar. 2025. “Analisis Ketimpangan Pendapatan , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.”
- Salwa, Najwa Aulia. 2024. “Sejarah Dan Perkembangan Konflik Gerakan” 3:102–7.
- Sari, Mutia, Habibur Rachman, Noni Juli Astuti, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah. 2023. “Jurnal pendidikan Sains Dan Komputer Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif Jurnal pendidikan Sains Dan Komputer” 3 (1): 10–16.
- Satria, Ase. n.d. “Teori Kemiskinan (Pengertian / Definisi, Ciri-Ciri Dan Dimensi-Kemiskinan-Menurut-Para-Ahli-).”
<https://www.materibelajar.id/>.
- Sayahafiz.com. 2023. “Sahih Al-Bukhari.” Beranda Hadist. 2023.
[sayahafiz.com/4801/7008/Sahih Al-Bukhari/Hadits.html](https://sayahafiz.com/4801/7008/Sahih-Al-Bukhari/Hadits.html).
- Schultz, Theodore W. 1972. *Of Economic Research Volume Author / Editor : Theodore W . Schultz Chapter Title : Human Capital : Policy Issues a Nd Research Opportunities Human Capital : Policy Issues and Research Opportunities*. Vol. I.
- Septiadi, Dudi, and Muhammad Nursan. 2023. “Simulasi Kebijakan Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia the Simulation of Agricultural Policies for Poverty Reduction in Indonesia” 24 (1): 75–85.
- Sri Hartati, Yuniar. 2021. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12 (1): 79–92.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>.
- Statistik, Badan Pusat. 2026. “Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2025.” Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik. 2026.-<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWeTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut->

- provinsi--2023.html?year=2025.
- Statistika, Badan Pusat. 2024. "Tingkat Penyelesaian pendidikan Menurut Jenjang pendidikan Dan Provinsi, 2023." Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik. 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MCMY/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>.
- . 2025. "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan-BPS."-Badan-Pusat-Statistika.-2025. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.
- STIS, Forkas. 2020. "Mengenal Konsep Basic Needs Approach Sebagai Landasan Data Kuantitatif Kemiskinan Di Indonesia." Forkas. 2020. <https://forkas.stis.ac.id/2020/02/mengenal-konsep-basic-needs-approach.html>.
- Subroto, Gatot. 2014. "Hubungan pendidikan Dan Ekonomi : Perspektif Teori Dan Empiris Education And Economics: Perspectives of Theoretical and Empirical" 20 (September): 390–400.
- Sugiharjo, Dedhy, Suriani Suriani, and Chenny Seftarita. 2022. "The Effect of Education and Health on Poverty Reduction in Aceh Province , Indonesia : Moderating Role of Special Autonomy Fund" 1 (4): 292–302.
- Sugiono, prof. dr. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiono, Prof Dr. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Dr Ir Sutopo SPd MT.
- Sugiyono, Prif. 2023. *Statistik Untuk Penelitian*.
- Sugiyono, Prof Dr. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Setiawan SH MPd. 3rd ed.
- Summary, Executive. 2027. "Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh Dan Pembentukan Badan Pengelola DOKA."
- Sumselprov. 2025. "Profil Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan." Webmaster@sumselprov.Go.Id. 2025.
- Surabaya, Universitas Ciputra, Program Studi Informatika (IMT-AI & IMT-FSD), and Citraland CBD Boulevard. n.d. "Pengertian Hipotesis Dan-Langkah-Perumusan-Hipotesis." <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/01/2016-1-11-pengertian-hipotesis-dan-langkah-perumusan-hipotesis/>.
- Suryani, Dini. 2018. *Politik Pengeolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa "BAB II, Desentralisasi Fiskal Asimetris: Pengaruh Dan Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Pengelolaannya Di Indonesia "*. Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro.

- Syafrin, Yulia, Muhiddinur Kamal, Arman Husni, and Negeri Iain Bukittinggi. 2023. "Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan Agama Islam" 2 (1): 72–77.
- Tahun, UU 26. 2025. "Defenisi Dana Otonomi Khusus." 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/dana-otonomi-khusus?id=220b1308201407ec238592c831074b24>.
- Tolikara, KPU kab. n.d. "Daerah Otonomi Khusus Indonesia, Pengertian, Tujuan,-Dan-Tantangannya."-https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8132_daerah-otsus-di-indonesia-pengertian-tujuan-dan-tantangannya.
- Ubm. 2021. "Belajar Data Sekunder, Dari Pengertian Sampai Teknik Pengumpulan-Data."-Ubmadmin.-2021. <https://www.ubm.ac.id/belajar-data-sekunder-dari-pengertian-sampai-teknik-pengumpulan-data/>.
- Ubmadmin. 2021. "Belajar Data Sekunder, Dari Pengertian Sampai Teknik Pengumpulan Data." UBM Universitas Bunda Mulia. 2021. <https://www.ubm.ac.id/belajar-data-sekunder-dari-pengertian-sampai-teknik-pengumpulan-data/>.
- University, Cakrawala. 2024. "Apa Itu Analisis Deskriptif, Contoh Dan Fungsinya." 2024. <https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-analisis-deskriptif>.
- Utami, Farathika Putri. 2020. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh" 4 (2): 101–13.
- Wijayanti, Sri Wulan, Abd Jamal, and Putri Bintusy Syathi. 2021. "Transmission of Special Autonomic Funds in the Economy through Mediation Variables" 2 (3): 163–72.
- Wikipedia. 2025. "Lingkaran Setan Dalam Ilmu Ekonomi." WIKIMEDIA Project. 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran_setan.
- . 2026a. "Gerakan Aceh Merdeka." WikipediA Ensiklopedia Bebas. 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka.
- . 2026b. "Sumatera." WikipediA Ensiklopedia Bebas. 2026. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra#:~:text=Pulau Sumatra terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara>.
- Yudhistira, Tri Aprian, and Nurlaila Hanum. 2026. "Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Aceh Berdasarkan Tabel 1 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Mengalami Fluktuasi," no. 11.
- Yuliara, I Made. 2016. "Regresi Linier Berganda."
- Zuhro, R. Siti. 2018a. *BAB VI "Dana Otsus Dan Istimewa Untuk Siapa?"*

Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- . 2018b. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa (Bab VI, Dana Otsus Dan Istimewa Untuk Siapa?)*. Edited by Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro.

LAMPIRAN

Tabel Tabulasi Data

Provinsi	Tahun	Otsus	PAD	Anggaran Pendidikan	Kemiskinan
Aceh Selatan	2019	122218000000	148620000000	403040000	13.09
	2020	133794000000	129940000000	444000000	12.87
	2021	104057600000	133420000000	461900000	13.18
	2022	153949090909	141960000000	304000000000	12.43
	2023	806400000000	1590800000000	318700000000	12.1
	2024	45572073000	2543900000000	321000000000	12.02
	2025	46178272000	2314100000000	321400000000	9.89
Tenggara Aceh	2019	130061000000	999400000000	270320000	13.43
	2020	131506000000	950200000000	398000000	13.21
	2021	10243130000	969900000000	413200000	13.41
	2022	138240000000	1140500000000	355900000000	12.83
	2023	72411428571	933300000000	367100000000	12.45
	2024	45500943000	1208800000000	365300000000	11.99
	2025	45629078000	1305300000000	365500000000	9.78
Aceh Timur	2019	201827000000	1883400000000	441800000	14.47
	2020	162910000000	1840900000000	581100000	14.08
	2021	12610570000	1273900000000	604000000	14.45
	2022	194792727273	1328600000000	631400000000	13.91
	2023	102034285714	1034700000000	634500000000	13.39
	2024	56135157000	1436900000000	643500000000	13.26
	2025	58432686000	1743000000000	636200000000	11.24
Aceh Tengah	2019	120601000000	1883400000000	208670000	15.5
	2020	130855000000	1664100000000	386000000	15.08
	2021	10203920000	1502000000000	401000000	15.26
	2022	135098181818	1725500000000	272200000000	14.5
	2023	70765714286	1491800000000	278200000000	14.38
	2024	46428796000	1574500000000	291400000000	14.27
	2025	47855883000	1811700000000	294900000000	12.29
Aceh Barat	2019	106186000000	1686900000000	314280000	18.79
	2020	94833223328	1447700000000	369000000	18.34
	2021	91335530000	1303300000000	383200000	18.81
	2022	128814545455	1299900000000	249300000000	17.93
	2023	67474285714	1344700000000	247400000000	17.86
	2024	41063904000	1661100000000	251900000000	17.6
	2025	45234436000	1906900000000	255800000000	15.5

Aceh Besar	2019	120318000000	134390000000	387960000	13.92
	2020	138427000000	185370000000	540300000	13.84
	2021	107567000000	181140000000	561600000	14.05
	2022	182225454545	196000000000	48380000000	13.38
	2023	95451428571	154560000000	47660000000	13.38
	2024	49508232000	18180000000	47000000000	13.21
	2025	50890645000	197680000000	46940000000	11.05
Kab.Pidie	2019	152919000000	282210000000	508160000	19.46
	2020	146550000000	243370000000	590500000	19.23
	2021	113890000000	243600000000	613900000	19.59
	2022	197934545455	252880000000	49530000000	18.79
	2023	103680000000	216850000000	49850000000	18.78
	2024	50387684000	219030000000	49260000000	18.59
	2025	52322599000	271950000000	48950000000	16.46
Aceh Utara	2019	124623000000	244750000000	714780000	17.39
	2020	158869000000	288590000000	570400000	17.02
	2021	12344150000	277510000000	592900000	17.43
	2022	257629090909	230410000000	88560000000	16.86
	2023	134948571429	194390000000	88430000000	16.64
	2024	55675474000	202830000000	87670000000	16.11
	2025	57578885000	236790000000	88950000000	14.27
Simeulu	2019	98370423520	65560000000	168190000	18.99
	2020	103070000000	64800000000	245950000	18.49
	2021	80213910000	69450000000	253900000	18.98
	2022	92683636364	75270000000	18810000000	18.37
	2023	48548571429	69650000000	16640000000	17.92
	2024	3488814000	121590000000	16410000000	17.69
	2025	38154584000	87860000000	1635000000	15.52
Aceh Singkil	2019	110347000000	58270000000	206520000	20.78
	2020	105073000000	61140000000	262000000	20.2
	2021	81816630000	62350000000	271900000	20.36
	2022	97396363636	61250000000	23520000000	19.18
	2023	51017142857	54190000000	24340000000	19.15
	2024	36281650000	56140000000	24860000000	19.06
	2025	37140969000	71100000000	25660000000	17.07
Bireuen	2019	104607000000	175640000000	472820000	13.56
	2020	135865000000	173000000000	570400000	13.06
	2021	10576690000	180620000000	592900000	13.25
	2022	191650909091	183560000000	56580000000	12.51
	2023	100388571429	162700000000	56890000000	12.12
	2024	47596329000	194130000000	57380000000	12.1

	2025	47263711000	245860000000	58240000000	10.3
Abdya	2019	104624000000	88290000000	228810000	16.26
	2020	108256000000	94700000000	293700000	15.93
	2021	843059800000	106430000000	305100000	16.34
	2022	103680000000	100480000000	1881000000	15.44
	2023	54308571429	96170000000	19270000000	15.43
	2024	36815670000	113830000000	19050000000	15.32
	2025	39897589000	133180000000	19330000000	13.3
Gayo Lues	2019	161930000000	69060000000	164500000	19.87
	2020	129400000000	54100000000	230400000	19.32
	2021	10088420000	55930000000	239200000	19.64
	2022	84829090909	50000000000	14780000000	18.87
	2023	44434285714	45450000000	15490000000	18.82
	2024	44570197000	68080000000	17210000000	18.3
	2025	45117551000	84270000000	16910000000	16.77
Aceh Jaya	2019	125591000000	72000000000	198230000	13.36
	2020	115609000000	83120000000	215900000	12.87
	2021	898855100000	74830000000	224100000	13.23
	2022	80116363636	83940000000	14170000000	12.51
	2023	41965714286	64550000000	14350000000	12.42
	2024	40016251000	80020000000	14110000000	12.25
	2025	42710023000	92270000000	13960000000	10.37
Nagan Raya	2019	128955000000	139490000000	275390000	17.97
	2020	121271000000	89410000000	312800000	17.7
	2021	943682300000	88550000000	324200000	18.23
	2022	109963636364	101990000000	22110000000	17.38
	2023	57600000000	86420000000	22670000000	17.25
	2024	41935892000	108880000000	24270000000	16.94
	2025	42403402000	135990000000	25110000000	15.42
Aceh Tamiang	2019	112233000000	134310000000	318020000	13.38
	2020	123918000000	139730000000	433100000	13.08
	2021	965804200000	133270000000	450200000	13.34
	2022	150807272727	126900000000	41020000000	12.61
	2023	78994285714	100400000000	41700000000	12.51
	2024	43126430000	119860000000	40590000000	12.17
	2025	43225781000	135080000000	39400000000	10.84
Bener Meriah	2019	102536000000	92650000000	196480000	19.3
	2020	106946000000	102960000000	278000000	18.89
	2021	83256080000	83070000000	288700000	19.16
	2022	98967272727	54950000000	23900000000	18.39
	2023	51840000000	57260000000	24300000000	18.31

	2024	38029473000	84800000000	24970000000	18.18
	2025	39919827000	86140000000	25840000000	16.2
Pijay	2019	88824793982	69170000000	226550000	19.31
	2020	100161000000	79680000000	292400000	19.19
	2021	77743390000	91930000000	303600000	19.55
	2022	103680000000	107530000000	18370000000	18.45
	2023	54308571429	101370000000	19120000000	18.4
	2024	35247937000	135370000000	18680000000	18.28
	2025	37066109000	136740000000	18270000000	16.12
Banda Aceh	2019	74887433703	287350000000	294500000	7.22
	2020	138966000000	309700000000	450400000	6.9
	2021	10820440000	326990000000	476600000	7.61
	2022	157090909091	279620000000	36590000000	7.13
	2023	82285714286	281480000000	35420000000	7.04
	2024	55412585000	288440000000	37580000000	6.95
	2025	55719895000	403770000000	38560000000	5.45
Sabang	2019	73928138452	54290000000	139840000	15.6
	2020	81847181147	61740000000	147800000	14.94
	2021	63583490000	96740000000	153300000	15.32
	2022	54981818182	101050000000	6110000000	14.66
	2023	28800000000	70410000000	6260000000	14.59
	2024	29305676000	72340000000	6110000000	14.58
	2025	30667402000	62680000000	5870000000	12.75
Langsa	2019	78040783301	154450000000	182120000	10.57
	2020	95754326595	159530000000	314000000	10.44
	2021	74610270000	134160000000	326300000	10.96
	2022	109963636364	141960000000	20710000000	10.62
	2023	57600000000	146820000000	21250000000	10.53
	2024	34268256000	185360000000	20830000000	10.33
	2025	35215914000	209940000000	20520000000	8.59
Lhokseumawe	2019	79402072351	69440000000	216970000	11.18
	2020	96137969458	67220000000	350000000	10.8
	2021	74560840000	67520000000	363600000	11.16
	2022	122530909091	70440000000	25080000000	10.84
	2023	64182857143	59860000000	26120000000	10.73
	2024	34877553000	71060000000	27150000000	10.44
	2025	35636650000	80900000000	27060000000	9.01
Subulussalam	2019	97391453702	57540000000	148140000	17.95
	2020	97546830471	66940000000	206200000	17.6
	2021	75748480000	64190000000	214000000	17.65
	2022	76974545455	80190000000	17560000000	16.94

	2023	40320000000	75120000000	17720000000	16.41
	2024	33047194000	72140000000	17750000000	16.38
	2025	34569730000	75430000000	18090000000	13.88

Lampiran hasil olah data EViews

1. Analisis Deskriptif

	KMS	OTSUS	PAD	PDK
Mean	14.83615	1.02E+11	1.33E+11	1.83E+10
Median	14.66000	7.80E+10	1.21E+11	1.64E+10
Maximum	20.78000	9.66E+11	4.04E+11	8.90E+10
Minimum	5.450000	3.49E+09	1.82E+10	1.40E+08
Std. Dev.	3.410371	1.38E+11	6.98E+10	2.11E+10
Skewness	-0.387475	5.122199	1.068643	1.275888
Kurtosis	2.460509	30.69831	3.865695	4.409358
Jarque-Bera	5.981140	5850.635	35.67105	57.00643
Probability	0.050259	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	2388.620	1.64E+13	2.14E+13	2.95E+12
Sum Sq.	37298.82	4.71E+24	3.64E+24	1.25E+23
Sum Sq. Dev.	1860.901	3.05E+24	7.81E+23	7.12E+22
Observations	161	161	161	161

2. Pelihan model

Sub 1

a. Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.659943	(22,136)	0.0422
Cross-section Chi-square	38.294009	22	0.0170

Nilai Prob 0.0170 < 0.05 = FEM

b. Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.047547	2	0.0179

Nilai prob 0.0179 < 0.05 = FEM (fixed)

c. Uji lm

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.756121 (0.3845)	503.9590 (0.0000)	504.7152 (0.0000)
Honda	0.869552 (0.1923)	22.44903 (0.0000)	16.48873 (0.0000)
King-Wu	0.869552 (0.1923)	22.44903 (0.0000)	20.30146 (0.0000)
Standardized Honda	1.160959 (0.1228)	24.84696 (0.0000)	14.26804 (0.0000)
Standardized King-Wu	1.160959 (0.1228)	24.84696 (0.0000)	19.26618 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	504.7152 (0.0000)

Ilia crros sec,, 0.3845 > 0.05= CEM

Sub 2

a. Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	117.585951	(22,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	483.612981	22	0.0000

NILAI PROB. 0.000 < 0.05 = FEM

b. Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.446428	3	0.6947

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
OTSUS	0.000000	0.000000	0.000000	0.8315
PAD	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.8690
PDK	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.6456

c. Uji lm

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

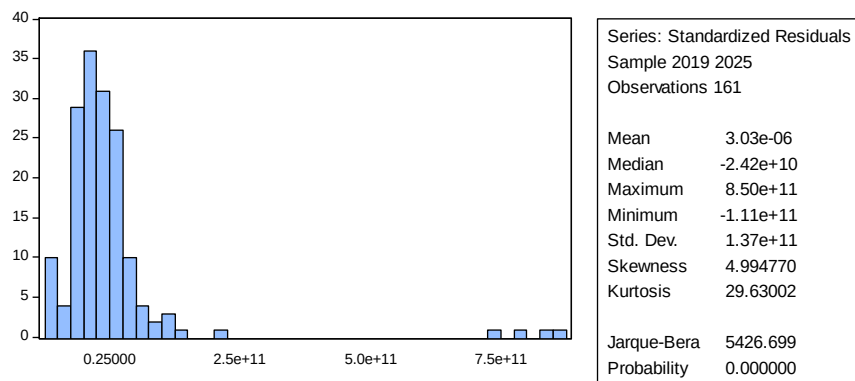
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	420.6906 (0.0000)	0.063801 (0.8006)	420.7544 (0.0000)
Honda	20.51074 (0.0000)	-0.252589 (0.5997)	14.32468 (0.0000)
King-Wu	20.51074 (0.0000)	-0.252589 (0.5997)	9.270733 (0.0000)
Standardized Honda	21.50386 (0.0000)	0.210891 (0.4165)	12.27718 (0.0000)
Standardized King-Wu	21.50386 (0.0000)	0.210891 (0.4165)	7.430521 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	420.6906 (0.0000)

NILAI CRSS $0.000 < 0.05 = \text{REM}$

ASUMSI KLASIK

SUB 1 =CEM -noen

a. UJI NORMALITAS



b. MULTIKOL

	OTSUS	PAD
OTSUS	1	-0.0169616...
PAD	-0.0169616...	1

c. UJI HETERO

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 05/26/26 Time: 01:30
Sample: 2019 2025
Periods included: 7
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 161

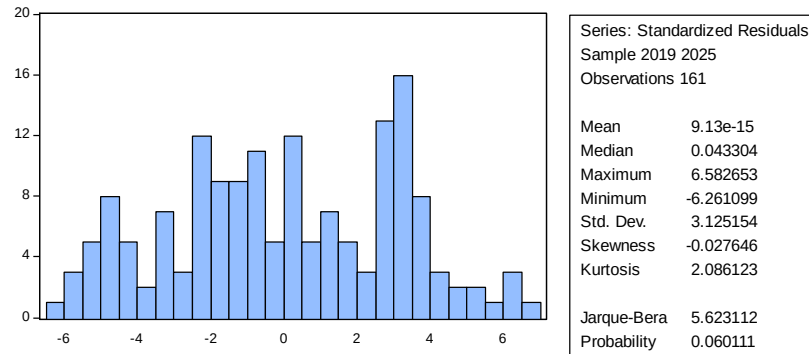
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.69E+10	9.95E+09	-1.699326	0.0912
OTSUS	0.795697	0.031570	25.20386	0.0000
PAD	-0.023788	0.062355	-0.381491	0.7034

d. AUTO

Mean dependent var	1.83E+10
S.D. dependent var	2.11E+10
Akaike info criterion	50.31507
Schwarz criterion	50.37248
Hannan-Quinn criter.	50.33838
Durbin-Watson stat	0.598567

SU 2 = REM- RANDOM

a. UJI NORMALITAS



b. MULTIKOL

	OTSUS	PAD	PDK
OTSUS	1	-0.0169616...	-0.1131690...
PAD	-0.0169616...	1	0.28683518...
PDK	-0.1131690...	0.28683518...	1

c. UJI HETERO

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/26/26 Time: 01:42
 Sample: 2019 2025
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 161
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.927899	0.423888	6.907245	0.0000
OTSUS	1.43E-13	4.13E-13	0.345162	0.7304
PAD	-1.99E-12	1.94E-12	-1.029012	0.3051
PDK	-2.13E-12	2.94E-12	-0.724550	0.4698

d. AUTO

Mean dependent var	1.312471
S.D. dependent var	1.022299
Sum squared resid	88.41726
Durbin-Watson stat	1.351430

Uji hipotesis CEM

Sub 1

a. Uji t

Dependent Variable: PDK
Method: Panel Least Squares
Date: 05/26/26 Time: 01:47
Sample: 2019 2025
Periods included: 7
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 161

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.52E+09	3.65E+09	2.334780	0.0208
OTSUS	-0.016568	0.011582	-1.430450	0.1546
PAD	0.086084	0.022876	3.763094	0.0002

b. Uji f

R-squared	0.094008
Adjusted R-squared	0.082539
S.E. of regression	2.02E+10
Sum squared resid	6.45E+22
Log likelihood	-4047.363
F-statistic	8.197193
Prob(F-statistic)	0.000410

c. Rsquare

R-squared	0.094008
Adjusted R-squared	0.082539
S.E. of regression	2.02E+10
Sum squared resid	6.45E+22
Log likelihood	-4047.363
F-statistic	8.197193
Prob(F-statistic)	0.000410

Sub 2 REM

a. Uji t

Dependent Variable: KMS
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/26/26 Time: 01:51
Sample: 2019 2025
Periods included: 7
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 161
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.26675	0.747116	23.11118	0.0000
OTSUS	1.28E-12	4.68E-13	2.724754	0.0072
PAD	-1.50E-11	2.32E-12	-6.484111	0.0000
PDK	-3.05E-11	3.34E-12	-9.133941	0.0000

b. Uji f

R-squared	0.471237
Adjusted R-squared	0.461133
S.E. of regression	0.750445
F-statistic	46.63981
Prob(F-statistic)	0.000000

c. Rsquare

R-squared	0.471237
Adjusted R-squared	0.461133
S.E. of regression	0.750445
F-statistic	46.63981
Prob(F-statistic)	0.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sarina Junita lahir di Seuneubok Padang pada tanggal 24 Juni 2001. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan ayah dan mamak. Sejak lulus Madrasah penulis sudah mulai merantau dan tumbuh besar di tanah ratau.

Pendidikan formal penulis diawali di MIN 4 Seuneubo Padang dan berhasil diselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMP di pondok Swasta Darul Abrar di Aceh Jaya dan kemudian melanjutkan SMA

di pondok pesantren Modern Islam Al-Falah Abu Lam U di Aceh besar. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah penulis melanjutkan studi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

Pada tahun 2024, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama menempuh pendidikan magister, penulis memiliki minat yang besar pada bidang ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, ekonomi politik dan ekonomi Negara. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh dengan Anggaran Pendidikan variable mediasi”.

Penulis berharap ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan mamfaat bagi masyarakat, dunis, akademik serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah dan pembangunan daerah, khususya di Provinsi Aceh.